



PERUBAHAN RENSTRA

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2023 – 2026

"Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat"

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas sehingga dapat tercapainya Visi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai macam tantangan dan ancaman menjadi hal yang biasa dalam dinamika pembangunan infrastruktur. Maka untuk menghadapi segala macam dinamika yang terjadi tersebut dan agar pembangunan dapat berlangsung tetap sesuai dengan kerangka perencanaan maka disusunlah Rencana Strategis.

Rencana Strategis Perubahan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan hingga akhir periode pemerintahan Kepala Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah pada sisa masa pemerintahan kepala daerah di tahun 2021 dan 2022.

Demikian Rencana Strategis Perubahan ini disusun dan kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam penyusunan dokumen ini. Kami berharap semua pihak dapat saling bersinergi dalam melaksanakan pembangunan sehingga tercapainya pembangunan infrastruktur menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pangkalpinang, 5 Juni 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
NIP. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	37
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	74
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	79
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	79
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	82
3.2.1 Telaan Visi, Misi, dan Program	62
3.2.2 Tujuan dan Sasaran	63
3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	64
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Kabupaten/kota	88
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PUPR	88
3.3.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota	90
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	92
3.4.1 Telaahan RTRW	92
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	102
3.5.1 Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis	102
3.5.2 Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas.....	105
3.5.3 Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas	105

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	107
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas.....	107
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	109
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN.....	110
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	180
BAB VIII PENUTUP.....	198

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Diagram Struktur Organisasi	10
Gambar 2.2 Diagram Struktur Organisasi Unit UPTD	11
Gambar 2.3 Jaringan Jalan Nasional & Provinsi	65
Gambar 3.1 Peta Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	94
Gambar 3.2 Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...	97
Gambar 3.3 Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.....	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai	38
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas	39
Tabel 2.3 Status Jalan Nasional	62
Tabel 2.4 Sistem Jaringan Kolektor Primer	63
Tabel 2.5 Ruas Jalan Primer sebagai Jalan Provinsi	65
Tabel 2.6 Wilayah Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69
Tabel 2.7 Daftar Sungai Utama di WS Pulau Bangka	69
Tabel 2.8 Potensi Sungai di SWP DAS Cerucuk.....	70
Tabel 2.9 Potensi Sungai di SWP DAS Lenggang	71
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas	108
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	109
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang mendukung Tujuan dan Sasaran	110
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan	124
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD.....	181

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah undang-undang tersebut mewajibkan untuk semua pimpinan Perangkat Daerah (PD) Daerah menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMD. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2022 yang merupakan dampak dari adanya dinamika dalam proses pembangunan daerah baik faktor internal maupun eksternal, dan adanya penggabungan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka Renstra PD memerlukan perubahan dan penyesuaian sehingga kegiatan Perangkat Daerah tetap dapat dilaksanakan dengan dasar yang jelas dan tidak kontradiktif dengan dinamika yang ada.

Perubahan Renstra ini disusun dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang ada dan juga berpedoman pada rancangan awal RPJMD Perubahan. Dengan berlakunya Perubahan Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dapat menyesuaikan dengan perkembangan dinamika yang ada sehingga kegiatan tetap berlangsung secara efektif dan efisien. Dokumen ini juga akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2021 dan 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan idiil dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 -2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
 27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
32. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
37. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri F).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada sisa periode kepala daerah terpilih yaitu tahun 2021 dan 2022. Untuk itu, tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan kembali tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2022;
2. Menetapkan kembali program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2021-2022;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian PUPRPRKP dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis;
- BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tentang pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran serta sumber pendanaan indikatif;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
Memuat indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- BAB VIII : PENUTUP
Memuat tentang kesimpulan terkait indikator kinerja PD yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang;

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraannya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

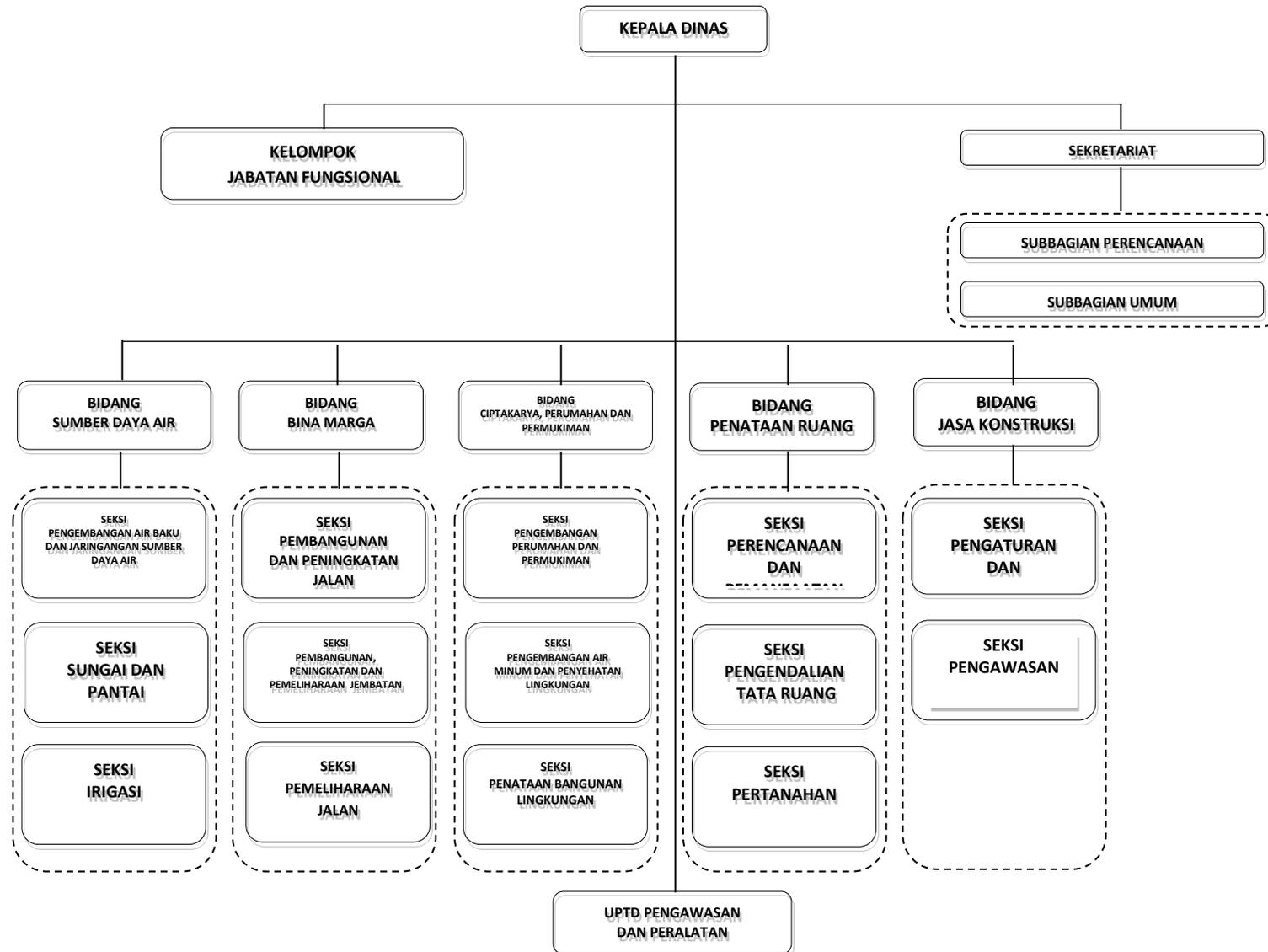
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

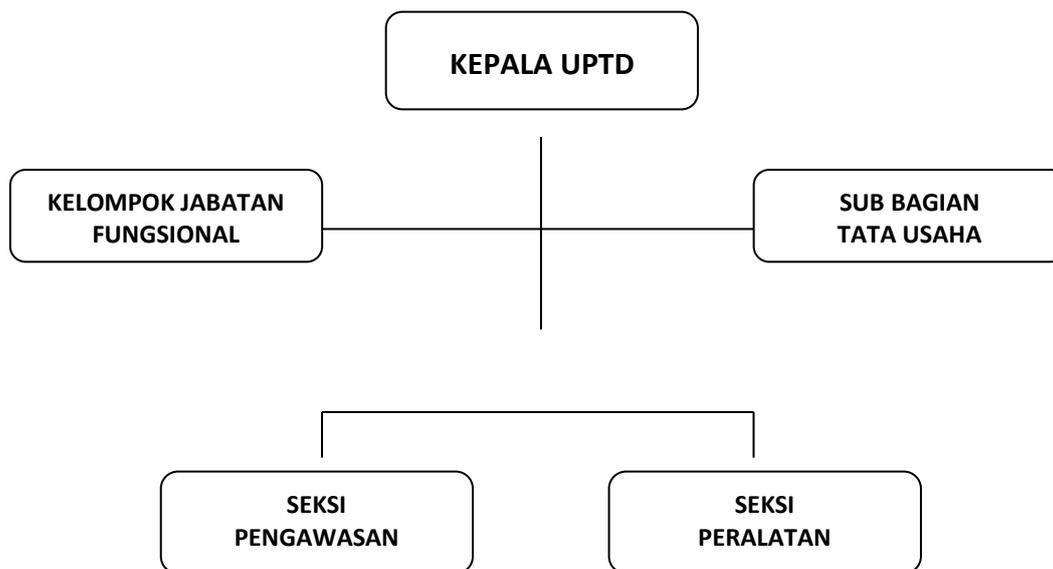
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2. 1.
Diagram Struktur Organisasi



Gambar 2. 2.

Diagram Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan Peralatan



1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- b. Bidang Sumber Daya Air;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya
- e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Bidang Jasa Konstruksi
- g. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Peralatan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta

membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengoordinasikan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) penyelenggaraan dan pengkordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang
- b) penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan
- c) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- d) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- e) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sedangkan tugas Sekretariat Meliputi :

- a) mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- b) memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang
- c) mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan
- d) mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- e) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian
- f) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- g) mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta UPTD
- h) mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- i) mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD

- lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- j) mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
 - k) mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan
 - l) mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD
 - m) memverifikasitelaahanstaf
 - n) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
 - o) mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan sekretariat
 - p) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
 - q) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Umum

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan, adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Subbagian Perencanaan
- b) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- c) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

- d) melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta UPTD
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- f) melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- g) melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan
- h) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- j) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
- k) merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- l) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

Uraian tugas Subbagian Umum adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Subbagian Umum
- b) merencanakan pengelolaan kearsipan
- c) merencanakan pengelolaan kepustakaan
- d) merencanakan pengelolaan data kepegawaian
- e) menyiapkan bahan pembinaan pegawai
- f) menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai
- g) menyiapkan bahan efisiensi dan tatalaksana
- h) merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
- i) merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- j) merencanakan penyelenggaraan kerumah tanggaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

- k) merencanakan penyusunan program kerja subbagian keuangan
- l) menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan
- m) melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran
- n) melaksanakan pelayanan perbendaharaan
- o) merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan
- p) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- q) merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan
- r) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
- s) melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- t) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai lintas daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000ha– 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
- b. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota
- c. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota
- d. mengoordinasikan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air pada kawasan strategis Provinsi, sungai dan pantai, irigasi dan rawa
- e. melaksanakan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa
- f. mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa
- g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengelolaan dan pengembangan sumber daya air

- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai, pantai, irigasi dan rawa Kabupaten/Kota
- i. melaksanakan dan mengendalikan dana tugas pembantuan (TP) bidang sumber daya air yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber pendanaan lainnya
- j. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air
- b. Seksi Sungai dan Pantai
- c. Seksi Irigasi.

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Seksi Pengembangan Air Baku Dan Jaringan Sumber Daya Air

Seksi pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air.

Uraian tugas Seksi pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengelolaan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- b) merancang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota lintas daerah Kabupaten/Kota
- c) mengembangkan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- d) membuat konsep pembinaan dan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air

- f) mengkaji ulang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang hasil analisis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- h) merencanakan dan menentukan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- i) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Sungai dan Pantai

Seksi sungai dan pantai mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sungai dan pantai. Uraian tugas Seksi Sungai dan Pantai adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi serta sistem informasi rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota
- b) merencanakan bangunan pengaman pantai dan sungai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota
- c) merancang pola rehabilitasi sungai dan pantai yang berkelanjutan
- d) mengembangkan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota
- e) membuat konsep rehabilitasi dan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) sungai dan pantai
- f) membuat konsep pembinaan dan pengawasan rehabilitasi sungai dan pantai Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pengembangan, rehabilitasi sungai dan pantai
- h) mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai
- i) merencanakan dan menentukan metode pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Irigasi

Seksi irigasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis irigasi.

Uraian tugas Seksi irigasi adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei, evaluasi dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000ha– 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
- b) merancang pola pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa
- c) mengembangkan pengelolaan kawasan irigasi dan rawa yang luasnya 1000 ha– 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
- d) membuat konsep pengembangan pembangunan irigasi dan rawa
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) irigasi dan rawa
- f) membuat konsep pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa
- g) membuat konsep pembinaan pengembangan pembangunan irigasi dan rawa Kabupaten/Kota
- h) mengkaji ulang pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa
- i) mengkaji ulang hasil analisa pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa
- j) merencanakan dan menentukan metode pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa
- k) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang bina marga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a) memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penyelenggaraan survei pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota
- c) menyelenggarakan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan
- d) mengoordinasikan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan

- e) mengevaluasi dan mengendalikan perencanaan dan penyelenggaraan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi
- f) mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan(NSPK) penyelenggaraan jalan dan jembatan
- g) mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi teknik penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota
- h) mengawasi dan mengendalikan anggaran tugas pembantuan (TP) bidang binamarga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah
- i) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
- b. Seksi Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan
- c. Seksi Pemeliharaan jalan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan.

Uraian tugas Pembangunan dan Peningkatan Jalan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi
- b) merancang teknik pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi
- c) mengembangkan aspek keselamatan pemanfaatan pembangunan dan peningkatan jalan
- d) membuat konsep spesifikasi pembangunan dan peningkatan jalan
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan dan peningkatan jalan
- f) menyusun program pembinaan teknik pembangunan jalan Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan

- h) menganalisis penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan
- i) merencanakan dan menentukan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan

Seksi Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan.

Uraian tugas Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- b) merancang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- c) mengembangkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- d) membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- f) menyusun program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- h) mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- i) merencanakan dan menentukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan.

Uraian tugas Pemeliharaan Jalan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi pemeliharaan jalan

- b) merancang metode penanganan pemeliharaan jalan
- c) mengembangkan pola pemeliharaan jalan
- d) membuat konsep pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pemeliharaan jalan
- f) menyusun program pembinaan teknik pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang polapemeliharaan jalan
- h) mengkaji ulang hasil analisis pelaksanaan pemeliharaan jalan
- i) merencanakan dan menentukan metode dan waktu pemeliharaan jalan berkala dan rutin
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Cipta Karya dan Permukiman

- (1) Bidang Cipta Karya dan Permukiman mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Cipta Karya dan Permukiman.
- (2) Bidang Cipta Karya dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan pemukiman Kabupaten/Kota;

- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang keciptakaryaan atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
- j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Cipta Karya dan Permukiman meliputi:

- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman Kabupaten/Kota;
- f. mengevaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;

- h. mengawasi dan mengendalikan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang keciptakaryaan atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
 - j. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - k. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Cipta Karya dan Permukiman dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Seksi Penataan Pengembangan Bangunan

- (1) Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan Dan Permukiman.
- (2) Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. pelaksanaan perancangan program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pengembangan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
 - g. pelaksanaan pengkajian program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;

- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. pelaksanaan penentuan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- j. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan pengembangan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- m. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- n. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
- o. pelaksanaan pengkajian pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis

- Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
- p. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program penyehatan lingkungan dan permukiman , penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
 - q. pelaksanaan penentuan program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
 - r. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman meliputi:
- a. menyusun rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. merancang program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. mengembangkan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - d. membuat konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
 - e. membuat konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;
 - f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
 - g. mengkaji ulang program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - h. mengkaji ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - i. menyusun program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;

- j. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- k. mengembangkan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. membuat konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- m. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- n. Membuat konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
- o. mengkaji ulang pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- p. mengkaji ulang analisis pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah

- regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- q. menyusun program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
 - r. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan.

Seksi Penyediaan Air Minum

- (1) Seksi Penyediaan Air Minum tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Penyediaan Air Minum.
- (2) Seksi Penyediaan Air Minum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
 - b. pelaksanaan perancangan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pengembangan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
 - f. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan umum masyarakat Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan pengkajian pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;

- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
 - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Penyediaan Air Minum meliputi:
- a. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
 - b. merancang program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
 - c. mengembangkan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
 - d. membuat konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
 - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
 - f. membuat konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota;
 - g. mengkaji ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
 - i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penyediaan Air Minum dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan.

Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat.

- (2) Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - c. penyelenggaraan kepemimpinan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lainnya;
 - g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman meliputi:
- a. memverifikasi penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - b. mengoordinasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - c. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - d. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - e. mengevaluasi dan mengendalikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - f. mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lainnya;
 - h. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- b) penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- c) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana detail / rencana rinci kawasan strategis Provinsi
- d) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- e) penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan
- f) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- g) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan
- h) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan
- i) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR) serta pertanahan
- j) penyelenggaraan dan pengoordinasian anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
- k) penyelenggaraan dan pengoordinasian penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi

- l) penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- m) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- n) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun tugas bidang Penataan Ruang dan Pertanahan adalah

- a) memverifikasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penyelenggaraan tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- b) melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- c) melaksanakan penyusunan rencana detail/rencana rinci kawasan strategis Provinsi
- d) mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- e) mengoordinasikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan
- f) mengevaluasi dan mengendalikan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- g) mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan
- h) mengevaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan
- i) mengevaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR) serta pertanahan
- j) melaksanakan anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
- k) melaksanakan penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi
- l) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Tata Ruang
- b. Seksi Pengendalian Tata Ruang
- c. Seksi Pertanahan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi
- b) merencanakan pola pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi
- c) merancang penyusunan rencana detail/rinci dan pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi
- d) mengembangkan pengembangan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi
- e) membuat konsep digital dan analog rencana tata ruang wilayah Provinsi
- f) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) revisi rencana tata ruang Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pemanfaatan ruang
- g) membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota
- h) mengkaji ulang penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi
- i) mengkaji ulang hasil analisis rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi
- j) membuat konsep pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR)
- k) Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian tata ruang.

Uraian tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- b) merancang pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- c) mengembangkan sistem pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- d) membuat konsep digital pengendalian tata ruang wilayah Provinsi

- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengendalian tata ruang
- f) membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota
- g) membuat konsep kebijakan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- h) mengkaji ulang pola pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- i) mengkaji ulang hasil analisis pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pertanahan.

Uraian tugas Seksi Pertanahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun program sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota
- b) merancang penyelenggaraan dan penataan aset infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya, perumahan dan sumber daya air
- c) mengembangkan pemberian rekomendasi izin lokasi berbasis digital
- d) membuat konsep sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota
- e) mengkaji ulang pemberian izin lokasi, penetapan lokasi, lintas Kabupaten/Kota
- f) mengkaji ulang hasil analisis kebijakan penyelenggaraan pertanahan
- g) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan dan pengoordinasian program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b) penyelenggaraan dan pengoordinasian program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- c) penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- d) penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi
- e) penyelenggaraan dan pengoordinasian pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- f) penyelenggaraan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi
- g) penyelenggaraan pembuatan konsep pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
- h) penyelenggaraan pengkajian ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
- i) Penyelenggaraan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten / Kota
- j) Penyelenggaraan pembinaan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- k) penyelenggaraan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksidi wilayah Provinsi
- l) penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- m) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- n) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Adapun tugas bidang Jasa Konstruksi adalah

- a) memverifikasi program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- c) membina Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- d) mengendalikan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi
- e) mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- f) mengoordinasikan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi
- g) memverifikasi konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
- h) memverifikasi penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- i) memverifikasi konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota
- j) membina dan mengendalikan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- k) membina tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- l) mengawasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- m) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan
- b. Seksi Pengawasan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi.

Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan

Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Uraian tugas Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b) merencanakan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- c) menyusun pola pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dana sosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- d) merencanakan dan melaksanakan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- e) mengembangkan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- f) mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi
- g) membuat konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistemjasa konstruksi
- h) mengkaji ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan(NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- i) membuat konsep pengaturan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan jasa konstruksi.

Uraian tugas Seksi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi
- b) merencanakan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi
- c) merencanakan pola pengawasan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi
- d) membuat konsep pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- e) mengkaji ulang pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi

- f) mengembangkan pola pengawasan tertib jasa konstruksi
- g) mengkaji ulang hasil analisis pola pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- h) membuat konsep pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem jasa konstruksi Kabupaten/Kota
- i) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya;

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit kerja masing-masing;

Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Tahun 2022

NO	RINCIAN	JUMLAH PNS	JUMLAH CPNS
1	BERDASARKAN JABATAN	22	-
	ESELON II	1	-
	ESELON III	7	-
	ESELON IV	14	-
2	BERDASARKAN PENDIDIKAN	195	-
	SD	-	-
	SLTP	-	-
	SLTA	32	-
	DIII	30	-
	SI/DIV	109	-
	S2	24	-
	S3	-	-
3	BERDASARKAN PANGKAT/GOL	195	-
	GOL. IV	11	-
	GOL. III	151	-
	GOL. II	33	-
	GOL. I	-	-
4	BERDASARKAN JENIS KELAMIN	195	-
	LAKI-LAKI	141	-
	PEREMPUAN	54	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan target rencana strategis tahun 2023 – 2026, didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), indikator kinerja pelayanan OPD.

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menguraikan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman berdasarkan rencana strategi tahun 2018 – 2022 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	30 orang pria dan 20 orang wanita	100%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	100,00%	130 orang	100%
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	2 Laporan	100%
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	0,00%	0,00%	20,67%	37,89%	48,23%	160 orang	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan	52,45%	56,91%	61,85%	70,74%	81,44%	130 orang	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan							
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%
2.1	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	0,170	0,220	0,280	0,500	1,000	0,170	100%
	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Gabungan Kelompok tani yang diberdayakan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	100%
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan berkala Jaringan Irigasi	Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara berkala	-	-	-	100 Hektar	125 Hektar	-	100%
	Penguatan Database dan Survei Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Dokumen database angka kebutuhan nyata OP dan kondisi jaringan irigasi	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	100%
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan rawa	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%
	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun	100 Hektar	-	-	-	-	100 Hektar	100%
	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang sumber daya air	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	100%
2.2	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Penyediaan Air Baku	10,0%	10,4%	10,8%	11,2%	11,6%	10,0%	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Pembangunan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	Volume kapasitas embung air baku dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan	-	-	-	0	0	-	100%
	Konservasi sumber air	Luas sumber-sumber air yang dilakukan perlindungan konservasi air	-	1 Hektar	1 Hektar	1 Hektar	1 Hektar	-	100%
	Penyusunan Regulasi tentang Air Permukaan	Jumlah Regulasi tentang air permukaan	1 Regulasi	-	-	1 Regulasi	-	1 Regulasi	100%
	Perencanaan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	Dokumen perencanaan teknik embung dan prasarana peyediaan air baku	-	-	-	-	-	-	100%
2.3	Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	0,02%	0,13%	0,20%	0,32%	0,50%	0,02%	100%
	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Dokumen perencanaan teknis turap/talud/bronjong	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	100%
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Konstruksi Turap/Talud/Bronjong	-	150 m	210 m	230 m	250 m	-	100%
	Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Panjang Saluran Banjir Yang ditingkatkan/dinormalisasi	1.800 m	2.500 m	4.000 m	5.000 m	6.000 m	1.800 m	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	Panjang Saluran Banjir Yang direhab/dinormalisasi	-	2.500 m	4.000 m	5.000 m	6.000 m	-	100%
	Pembangunan Peningkatan Drainase	Panjang Drainase yang terbangun	-	-	550 m	750 m	1000 m	-	100%
	Perencanaan Teknis Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	Jumlah Dokumen perencanaan teknis bangunan pengendali daya rusak air	-	-	-	-	-	-	100%
	Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	Volume Kapasitas Tampungan Kolam Pengendali daya rusak air	-	-	-	5.000 m ³	5.000 m ³	-	100%
3	Program Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	33%	49%	66%	83%	100%	33%	100%
	Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terlantar	Luas HGU, HGI dan HTI	-	-	10 Hektar	10 Hektar	10 Hektar	-	100%
	Sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang rencana rinci tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Jumlah peserta Sosialisasi tentang Rencana Rinci Tata Ruang	-	-	-	400 peserta	400 peserta	-	100%
	Koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang	Surat Rekomendasi teknis pemanfaatan kawasan strategis provinsi	4 Rekomendasi teknis	16 Rekomendasi teknis	16 Rekomendasi teknis	16 Rekomendasi teknis	16 Rekomendasi teknis	4 Rekomendasi teknis	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
			pemanfaatan ruang						
	Monitoring dan Evaluasi Peta HGU dan HGB yang melanggar RTRW Prov. Kep. Babel	Luas HGU dan HGB yang teridentifikasi melanggar RTRW Prov. Kep. Babel	-	-	1.000 Hektar	3.000 Hektar	5.000 Hektar	-	100%
	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	Jumlah dokumen teknis dan peta teknis pengembangan kawasan strategis provinsi	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	100%
	Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Jumlah Regulasi RRTR KSP	-	-	2 Regulasi	4 Regulasi	2 Regulasi	-	100%
	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah		-	10 Hektar	61 Hektar	61 Hektar	60 Hektar	-	100%
	Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	100%
	Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perda Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	-	-	-	-	-	-	100%
	Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	15 Pelanggaran	100%					

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
4	Program Pertanahan	persentase luas lahan termanfaatkan untuk kepentingan infrastruktur	0%	15%	35%	75%	100%	0%	100%
	Survey inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	Jumlah dokumen inventarisasi tanah	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	100%
	Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	2 Pembinaan dan Pelatihan	2 Pembinaan dan Pelatihan	2 Pembinaan dan Pelatihan	-	100%
	Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Peserta Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	-	100%
	Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	1 Neraca	1 Neraca	1 Neraca	-	100%
	Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Pantai	Luas Sempadan Pantai (hektar)	-	-	3000 Hektar	3000 Hektar	3000 Hektar	-	100%
5	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	84%	88%	92%	96%	100%	84%	100%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikasi	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan data dan informasi Jasa Konstruksi	3 Layanan	3 Layanan	-			3 Layanan	100%
	Peningkatan Fungsi Mobile Training Unit (MTU)	Jumlah layanan data dan informasi Jasa Konstruksi	-	-	-	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	-	100%
	Penyelenggaraan Pelatihan Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang dilatih	-	-	-	30 Orang	30 Orang	-	100%
	Pemberdayaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Kelembagaan Jasa Konstruksi yang diberdayakan	-	-	-	20 Asosiasi	20 Asosiasi	-	100%
	Penyusunan Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan tertib usaha, perijinan dan sistem rantai pasok jasa konstruksi	-	-	-	21 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	21 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	-	100%
									100%
6	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik	87,5%	87,5%	91,67%	93,75%	95,00%	87,5%	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Peralatan workshop	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	Program Kebinamargaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	83,66%	84,16%	84,66%	85,16%	85,56%	92,23%	100%
	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang ditingkatkan	11,584 km	30,9 km	24 Km	25 Km	26 Km	11,584 km	100%
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan baru yang terbangun	11,5 km	20,65 km	14,65 km	15 km	15 km	11,5 km	100%
	Pembangunan Jalan (PHNJD)	Panjang Jalan baru yang terbangun		13 km	15 km	17 km	17 km		100%
	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang bina marga	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	100%
	Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jalan	2 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Leger Jalan	Jumlah dokumen inventaris Lebar jalan 3 m - 4.5 m dan bangunan pelengkap	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	100%
	Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen data Jalan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengadaan Alat-Alat berat	Jumlah pengadaan alat berat	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	-	100%
	Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebina margaan	Jumlah Pengadaan alat-alat ukur dan pengujian laboratorium kebinamargaan	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	100%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%
	Leger Jembatan	Jumlah dokumen inventaris Jembatan dan Bangunan pelengkap	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Rehabilitasi /pemeliharaan rutin jembatan	panjang jembatan provinsi yang terpelihara	3.050,67 meter	3.119,37 meter	3.119,37 meter	3.119,37 meter	3.119,37 meter	3.050,67 meter	100%
	inspeksi kondisi jembatan	jumlah dokumen data kondisi jembatan provinsi	1 dokumen	100%					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang fungsional Jalan Provinsi Yang terpelihara		813,19 Km	816,99 km	815,99 km	814,99 km		100%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang efektif Jalan Provinsi Yang terpelihara		6,9 Km	10 km	10 km	10 km		100%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	Panjang Jembatan Baturusa II yang terpelihara	784 m	100%					
	Pembangunan/Peningkatan Jalan DAK	Panjang Jalan baru yang terbangun/ditingkatkan	18,85	8,70	16,00	15,00	15,00	18,85	100%

Tabel 2.3.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2018 – 2022

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.120.049.254	5.651.510.500	6.447.611.550	7.092.372.705	7.801.609.976	3.262.725.561	79,19%		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	122.000.000	140.000.000	154.000.000	169.400.000	186.340.000				
Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.478.689.000	3.815.952.500	4.197.547.750	4.617.302.525	5.079.032.778				
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	73.312.000	31.228.000	34.350.800	37.785.880	41.564.468				
Peningkatan Disiplin Aparatur	230.950.000	-	230.950.000	254.045.000	279.449.500				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.147.543.254	1.660.530.000	1.826.583.000	2.009.241.300	2.210.165.430				
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.555.000	3.800.000	4.180.000	4.598.000	5.057.800				
Program Pengembangan Sumber Daya Air	3.958.590.000	732.240.000	677.725.535	2.276.098.089	2.503.707.897	14.499.789.281	93,74%		
Pemberdayaan Petani Pemakai Air	460.840.000	471.365.000	524.365.000	576.801.500	634.481.650				

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Rehabilitasi/ Pemeliharaan berkala Jaringan Irigasi	-	-	-	1.405.600.000	1.546.160.000				
Penguatan Database dan Survei Kondisi Jaringan Irigasi	-	-	-	125.000.000	137.500.000				
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	-	260.875.000	-	-	-				
Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	3.497.750.000	-	-	-	-				
Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	-	-	153.360.535	168.696.589	185.566.247				
Program Pengembangan Sumber Daya Air	326.220.000	1.046.115.000	1.255.338.000	1.380.871.800	1.518.958.980				
Pembangunan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	-	-	-	-	-				
Konservasi sumber air	-	1.046.115.000	1.255.338.000	1.380.871.800	1.518.958.980				

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Penyusunan Regulasi tentang Air Permukaan	326.220.000	-	-	-	-				
Perencanaan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	-	-	-	-	-				
Program Pengembangan Sumber Daya Air	12.906.020.000	15.462.427.200	35.435.560.499	45.995.672.599	53.041.846.869				
Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	-	300.875.000	-	-	-				
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	-	3.409.495.000	3.565.300.000	4.456.625.000	5.570.781.250				
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	12.906.020.000	8.985.932.200	17.052.650.000	18.757.915.000	20.633.706.500				
Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	-	2.766.125.000	12.012.525.000	14.415.030.000	17.298.036.000				

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Pembangunan Peningkatan Drainase	-	-	2.805.085.499	3.366.102.599	4.039.323.119				
Perencanaan Teknis Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	-	-	-	-	-				
Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	-	-	-	5.000.000.000	5.500.000.000				
Program Penataan Ruang	3.543.610.000	14.354.920.000	19.018.260.800	22.560.086.880	19.310.095.568	3.246.470.981	84,05%		
Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terlantar		-	600.000.000	600.000.000	600.000.000				
Sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang rencana rinci tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)		-	-	200.000.000	200.000.000				
Koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang	278.780.000	217.778.000	239.555.800	263.511.380	289.862.518				

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Monitoring dan Evaluasi Peta HGU dan HGB yang melanggar RTRW Prov. Kep. Babel		-	500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000				
Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	1.413.500.000	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-				
Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000				
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		12.500.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	14.000.000.000				
Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	1.686.190.000	265.592.000	-	-	-				
Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	-	-	-	-	-				
Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung	165.140.000	71.550.000	78.705.000	86.575.500	95.233.050				

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Program Pertanahan									
Survey inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000				
Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000				
Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	50.000.000	60.000.000	75.000.000				
Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	750.000.000	750.000.000	750.000.000				
Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Pantai	-	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000				
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1.719.075.000	852.296.000	356.855.000	500.975.000	551.072.500	690.919.362	45,48		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	975.290.000	680.279.000	356.855.000	500.975.000	551.072.500				

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	743.785.000	172.017.000	-						
Peningkatan Fungsi Mobile Training Unit (MTU)	-	-	-	215.825.000	237.407.500				
Penyelenggaraan Pelatihan Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	-	-	128.155.000	140.970.500				
Pemberdayaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	-	-	-	138.370.000	152.207.000				
Penyusunan Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	-	93.990.000	103.389.000				
Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi	-	-	-	229.870.000	252.857.000				
Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	1.138.490.000	1.307.028.000	1.437.730.800	1.581.503.880	1.739.654.268	926.757.725	81,40%		

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	819.970.000	1.001.788.000	1.101.966.800	1.212.163.480	1.333.379.828				
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	283.480.000	301.747.000	331.921.700	365.113.870	401.625.257				
Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	35.040.000	3.493.000	3.842.300	4.226.530	4.649.183				
Program Kebinamargaan	140.041.812.567	269.756.518.200	416.287.992.120	450.284.993.712	480.619.642.583	181.686.592.043,99	98,51%		
Peningkatan Jalan			124.800.000.000	145.000.000.000	166.400.000.000				
Pembangunan Jalan	49.630.354.000	93.652.090.000	66.884.927.880	67.500.000.000	67.500.000.000				
Pembangunan Jalan (PHNJD)		74.478.000.000	86.579.205.000	100.000.000.000	100.000.000.000				
Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	-	611.850.000	673.035.000	740.338.500	814.372.350				

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Perencanaan Pembangunan Jalan	2.426.950.000	2.109.800.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.630.000.000				
Leger Jalan	-	602.525.000	662.777.500	729.055.250	801.960.775				
Inspeksi Kondisi Jalan	125.600.000	163.800.000	180.180.000	198.198.000	218.017.800				
Pengadaan Alat-Alat berat			5.200.000.000	5.720.000.000	6.292.000.000				
Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebina margaan			260.000.000	300.000.000	400.000.000				
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	82.400.000	99.130.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000				
Perencanaan Pembangunan Jembatan	801.690.000	1.002.740.000	1.103.014.000	1.213.315.400	1.334.646.940				

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Pembangunan Jembatan	3.539.200.000	10.206.822.200	12.248.186.640	6.736.502.652	7.410.152.917				
Leger Jembatan			650.000.000	715.000.000	786.500.000				
Rehabilitasi /pemeliharaan rutin jembatan	1.320.200.000	1.374.211.000	1.511.632.100	1.662.795.310	1.829.074.841				
inspeksi kondisi jembatan	129.198.567	12.000.000	180.000.000	198.000.000	217.800.000				
Pemeliharaan Rutin Jalan		30.062.790.000	32.967.870.000	36.728.355.000	40.479.840.000				
Pemeliharaan Berkala Jalan		18.150.300.000	25.000.000.000	27.500.000.000	30.250.000.000				
Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	2.211.220.000	1.544.160.000	1.698.576.000	1.868.433.600	2.055.276.960				

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Pembangunan/Peningkatan Jalan DAK	79.775.000.000	35.686.300.000	52.538.588.000	50.000.000.000	50.000.000.000				

Pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

Sekretariat

Pelayanan kinerja bagian sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman meliputi :

- a. Pelayanan pengelolaan penataan keuangan yang berkaitan dengan penataan keuangan gaji dan tunjangan, keuangan perjalanan dinas, surat keputusan pemberhentian pembayaran, pencairan upah pungut, biaya operasional dan penyelesaian.
- b. Pelayanan umum dan kepegawaian yang berkaitan dengan penataan tata persuratan, urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, merencanakan dan menyusun kebutuhan ATK, administrasi kepegawaian berkaitan dengan daftar urut kepangkatan (DUK) DAN daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, urusan mutasi, tindakan disiplin, pemeliharaan ruangan, perlengkapan pegawai serta pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Pelayanan perlengkapan berkaitan dengan inventarisir dinas, rencana kebutuhan pengadaan, mengelola administrasi perlengkapan, membuat kartu inventaris barang serta penomoran kendaraan milik Negara.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Kinerja pelayanan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyangkut :

- a. Melakukan kajian terhadap kesesuaian RTRW Provinsi (Perda Nomor 2 Tahun 2014) dengan kondisi sesungguhnya di lapangan sebagai bahan dalam Peninjauan Kembali (PK) RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pembinaan terhadap penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten/Kota;
- c. Menyusun dokumen Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi dan melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota hingga ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah
- d. Menyediakan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi melalui peta analog dan peta digital, serta mendorong penyediaan sistem informasi penataan ruang kabupaten/kota
- e. Meningkatkan kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi serta peningkatan koordinasi dengan BKPRD Kabupaten/Kota dan membentuk kelompok

masyarakat peduli tata ruang melalui forum pelajar, mahasiswa, LSM dan masyarakat luas (pembentukan pokmas)

- f. Memfasilitasi kabupaten/kota dalam mendapatkan rekomendasi Gubernur tentang rencana rinci dan persetujuan substansi rencana rinci dari Pemerintah Pusat
- g. Melakukan pemberdayaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RTRW Provinsi dibandingkan dengan dokumen Rencana Tata Ruang.
- i. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, survei,identifikasi dan evaluasiizinlokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian gantikerugian dan santunantanah, penetapan subyekdan obyek redistribusi tanah,penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota
- j. merancang penyelenggaraan dan penataan aset infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya, perumahan dan sumber daya air
- k. mengembangkan pemberian rekomendasi izin lokasi berbasis digital
- l. membuat konsep sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugiandansantunan tanah,penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapantanah ulayat dan penyelesaian tanah kosonglintas Kabupaten/Kota
- m. mengkaji ulang pemberian izin lokasi, penetapan lokasi, lintas Kabupaten/Kota
- n. mengkaji ulang hasil analisis kebijakan penyelenggaraanpertanahan
- o. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk rekomendasi kegiatan tahun berikutnya.

Bidang Bina Marga

Kinerja pelayanan bidang bina marga diarahkan pada pengembangan prasarana jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dengan menyediakan jaringan jalan secara berjenjang dan efisien mulai dari pusat kegiatan terkecil sampai ke pusat kegiatan wilayah.
2. Meningkatkan kapasitas jalan pada ruas-ruas jalan yang volume lalulintasnya telah mendekati kapasitasnya.
3. Standarisasi lebar jalan pada ruas-ruas jalan yang lebarnya masih belum memenuhi standar lebar jalan menurut kategori kelas fungsi jalan tersebut.
4. Memelihara tingkat pelayanan jalan dengan melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kondisi perkerasan jalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.248/KPTS/M/2015 status jalan nasional non tol untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Status Jalan Nasional
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)
	LAMA	BARU		
1	001	001	TANJUNG KELIAN - IBUL	52,33
2	002	002	IBUL - KELAPA	25,52
3	003	003	KELAPA - BTS. KAB (BANGKA/BANGKA BARAT)	4,16
4	004	004	BTS. KAB (BANGKA/BANGKA BARAT) - PUDING GEBAK (SP. BELINYU)	1,16
5	005	005	PUDING GEBAK (SP. BELINYU) - PUDING BESAR	29,71
6	006	006	PUDING BESAR - BTS. KOTA PANGKAL PINANG	25,62
7	006	006 11K	JLN. DEPATI AMIR / JLN. MENTO (P. PINANG	2,28
8	006	006 12K	JLN. MESJID JAMI- (P. PINANG)	0,88
9	007	007	TANJUNG GUDANG - LUMUT	22
10	008	008	LUMUT - SEI LIAT	37,07
11	009	009	SEI LIAT - BTS. KOTA PANGKAL PINANG	28,84
12	009	009 11K	JLN. SUDIRMAN (P. PINANG)	4,28
13	009	009 12K	JLN. YOS SUDARSO (P. PINANG)	2,12
14	010	010	BTS. KOTA PANGKAL PINANG - NAMANG	21,76
15	010	010 11K	JLN. MAYOR SYAFRI (P. PINANG)	0,73
16	010	010 12K	JLN. SOEKARNO-HATTA (P. PINANG)	2,07
17	011	011	NAMANG - Koba	34,91
18	012	012	Koba - BTS. KAB. (BANGKA TENGAH/SELATAN)	7,07
19	013	013	BTS. KAB. (BANGKA TENGAH/SELATAN) - AIR BARA	1,49
20	014	014	AIR BARA - TOBOALI	54,9
21	015	015	TOBOALI - SADAi	38,89
22	016	016	TG. RU - PETIKAN	16,06
23	017	017	PETIKAN - PILANG (TANJUNG PANDAN)	14,84
24	018	018 11K	JLN. SAIDAN (T. PANDAN)	0,39
25	018	018 12K	JLN. VETERAN (T. PANDAN)	0,63
26	018	018 13K	JLN. SUDIRMAN (T.PANDAN-PERAWAS)	9,22
27	019	019 11K	PERAWAS - SP. 3 LAPANGAN TERBANG	4,72

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)
	LAMA	BARU		
28	020	020	PERAWAS - BADAU	10,83
29	021	021	BADAU - BTS. KAB. BELITUNG/BELITUNG TIMUR	8,76
30	022	022	BTS. KAB. BELITUNG/BELITUNG TIMUR - SP. RENGGIANG	23,48
31	023	023	SP. RENGGIANG - SP. PEDANG	24,02
32	024	024	SP. PEDANG - MANGGAR	2,08
33	025	025	JUNCTION (SP. LIMA TJ. PANDAN) - TANJUNG KELAYANG	28,07
34	026	026	SP. TANJUNG KELAYANG - TJ. TINGGI (SIJUK)	13,04
35		027	LUMUT - PUDING GEBAK	29,65
36		028	MANGGAR - PELABUHAN MANGGAR	3,39
37		029 11K	SP. PELABUHAN PANGKAL BALAM - SP. JALAN ALEXANDER (JLN. KETAPANG)(PANGKALPINANG)	5
38		029 12K	SP. JLN. ALEXANDER - SP. JLN. AIR ITAM (JLN. ALEXANDER)(PANGKALPINANG)	2,35
39		029 13K	SP. JLN. AIR ITAM - SP. JLN. PULAU PELEPAS	1,6
40		029 14K	JLN. PULAU PELEPAS (PANGKAL PINANG)	4,5
TOTAL PANJANG				600,40

Sumber : Kepmen PU No.248/KPTS/M/2015

Adapun pusat-pusat kegiatan yang dihubungkan oleh jaringan jalan nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sistem Jaringan Kolektor Primer/K1 (Jalan Nasional)

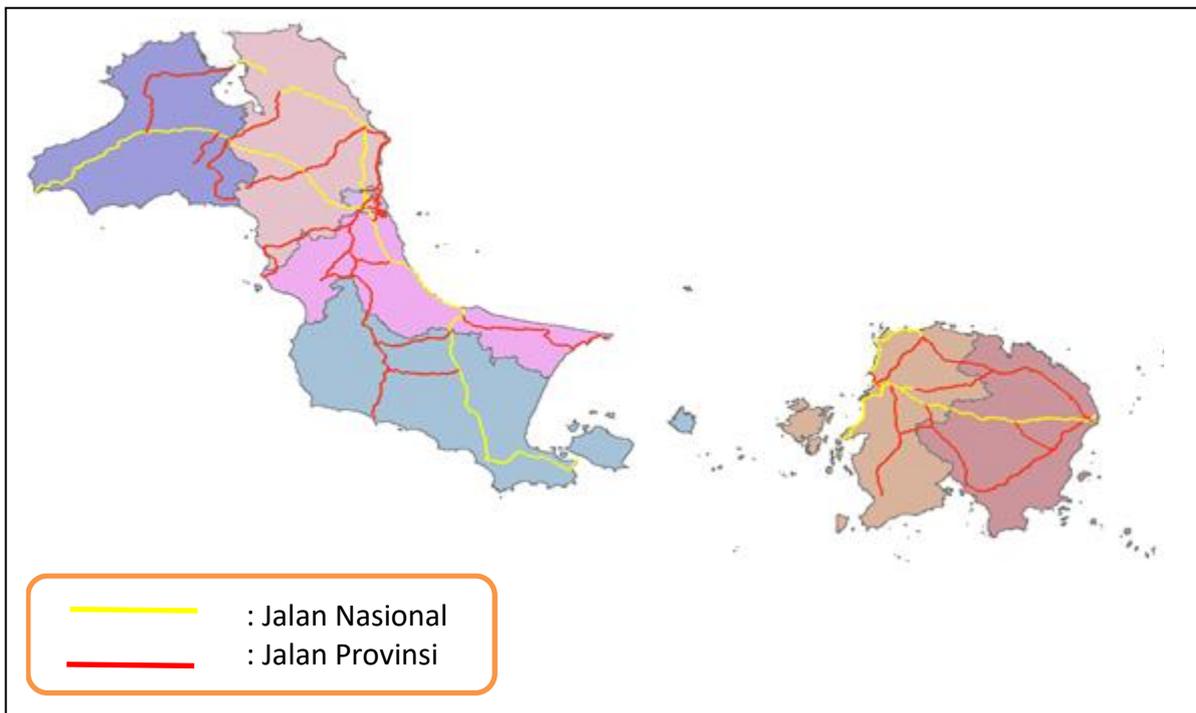
NO	PULAU	PUSAT-PUSAT YANG DIHUBUNGKAN	KELAS FUNGSI
A	PULAUBANGKA	Pangkalpinang (PKW) – Kelapa (PKL) - Muntok (PKW)	Kolektor Primer (K1)
		Pangkalpinang (PKW) – Sungailiat (PKL) – Belinyu (PKL)	Kolektor Primer (K1)
		Pangkalpinang (PKW) – Koba (PKL) – Toboali (PKL)	Kolektor Primer (K1)
B.	PULABELITUNG	Tanjungpandan (PKW) – Badau (PKL) - Manggar (PKW) – Kelapa Kampit (PKL)	Kolektor Primer (K1)

Sumber : Analisa Tim RTRW Prov. Kep. Babel 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 188.44/79/PU/II/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer Menurut Perannya

sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Gambar 2.3.
Jaringan Jalan Nasional & Provinsi di Provinsi Kep. Bangka Belitung



Sumber : SK Gubernur Kep. Bangka Belitung No. 188.44/79/PU/I/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer Menurut Perannya Sebagai Jalan Provinsi

Tabel 2.5
Ruas Jalan Primer sebagai Jalan Provinsi

NO	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas Jalan (Km)
1	2	3	4	5
		Pulau Bangka		
1	010.1 K	Simpang Semabung - Sampur	Rangkui	7,50
2	029.6 K	Simpang Pulau Bangka - Sampur	Pangkalan Baru	2,10
3	029.1 K	Pasir Padi- SP. Alexander	Bukit Intan	2,41
4	029.2 K	PPI	Ketapang	2,62
5	029.3 K	Trem	Ampui	0,55
6	029.4 K	RE Martadinata	Ampui	1,15
7	029.5 K	Sumberejo	Pangkalbalam	2,00
8	009.1 K	A.Yani	Bukit Intan	2,10
9	006.1 K	Pangkalpinang - Bts. Kota (Sp. Katis)	Rangkui	2,15
10	006.2	Pangkalpinang - Simpang Katis	SP. Katis	18,27
11	006.3	Simpang Katis - Sungai Selan	SP. Katis - S.Selan	15,78
12	010.2	Namang-Puput	SP. Katis - Namang	12,07
13	010.3	Puput - Simpang Katis	SP. Katis	4,56

NO	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas Jalan (Km)
1	2	3	4	5
14	010.4	Sungai Selan - Lampung - Sp. Gedong	SP. Katis - S. Selan	11,00
15	010.5	Puput - Sp. Gedong	SP. Katis - S. Selan	7,13
16	010.6	Sp. Gedong - Payung	Sungai Selan - Payung	33,50
17	014.1	Payung - Air Bara	Sungai Selan - Payung	29,00
18	014.2	Payung - Bedengung	Payung	13,80
19	014.3	Air Gegas - Bedengung	Air Gegas - Payung	24,40
20	014.4	Bedengung - Batu Betumpang	Payung - Pulau Besar	22,05
21	029.7	Sp. Alexander - Sp. Lingkaran Timur	Bukit Intan	6,70
22	009.1	Lingkaran Timur	P. Besar	21,73
23	009.2	Rebo - Tanjung Pesona - Jelitik - Simpang Perahu	Mendo Barat	14,30
24	009.3	Sungailiat - Puding Besar	Merawang - Sungailiat	29,87
25	005.1	Puding Besar - Saing - Kota Waringin	P. Besar - Mendo Barat	23,10
26	002.1	Sungai Dua - Dam III - Sangku	Tempilang	16,74
27	002.2	Sangku - Simpang Tempilang	Kelapa	20,65
28	002.3	Kelapa - Kayu Arang	Kayu Arang	16,65
29	001.1	Ibul - Parit Tiga	Parit Tiga	29,48
30	001.2	Parit Tiga - Tanjung Ru	Parit Tiga	27,06
31	006.4	Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur	SP. Katis - Mendo Barat	35,94
32	006.5	Penagan - Tanjung Tedung	Mendo Barat - S. Selan	16,55
33	011.1	Koba - Lubuk Besar	Koba - Lubuk Besar	34,20
34	011.2	Lubuk Besar - Tanjung Berikat	Lubuk Besar	27,04
		Dalam Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung		
35	029.8 K	Pulau Bangka	Bukit Intan	2,55
36	029.9 K	Pulau Belitung I	Bukit Intan	0,48
37	029.10 K	Pulau Belitung II	Bukit Intan	0,36
38	029.11 K	Pulau Gusung Asam	Bukit Intan	0,17
39	029.12 K	Pulau Gusung Baru	Bukit Intan	0,17
40	029.13 K	Pulau Pongok I	Bukit Intan	0,62
41	029.14 K	Pulau Pongok II	Bukit Intan	0,25
42	029.15 K	Pulau Pongok III	Bukit Intan	0,15
43	029.16 K	Pulau Ketawai	Bukit Intan	0,93
44	029.17 K	Pulau Ketawai I	Bukit Intan	0,43
45	029.18 K	Pulau Ketawai II	Bukit Intan	0,19
46	029.19 K	Pulau Mandanau	Bukit Intan	0,53
47	029.20 K	Pulau Lindung Laut	Bukit Intan	0,31
48	029.21 K	Pulau Lindung Darat	Bukit Intan	0,30
49	029.22 K	Pulau Batu Dinding I	Bukit Intan	0,58
50	029.23 K	Pulau Batu Dinding II	Bukit Intan	0,40
51	029.24 K	Pulau Punai	Bukit Intan	0,13

NO	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas Jalan (Km)
1	2	3	4	5
52	029.25 K	Pulau Semujur	Bukit Intan	0,13
53	029.26 K	Pulau Anyer	Bukit Intan	0,30
54	029.27 K	Pulau Panjang I	Bukit Intan	0,74
55	029.28 K	Pulau Panjang II	Bukit Intan	0,97
56	029.29 K	Pulau Panjang III	Bukit Intan	1,14
57	029.30 K	Pulau Lepar	Bukit Intan	1,11
58	029.31 K	Pulau Gelasa	Bukit Intan	0,62
59	029.32 K	Pulau Lampu	Bukit Intan	0,29
60	029.33 K	Pulau Putri I	Bukit Intan	0,15
61	029.34 K	Pulau Putri II	Bukit Intan	0,13
62	029.35 K	Pulau Putri III	Bukit Intan	0,09
63	029.36 K	Pulau Nangka	Bukit Intan	1,06
64	029.37 K	Akses Bandara	Bukit Intan	0,43
		Pulau Belitung		
65	018.1 K	Gatot Subroto (Tg Pandan)	Tanjung Pandan	2,50
66	018.2 K	Diponegoro (Tg. Pandan)	Tanjung Pandan	1,04
67	018.3 K	Dahlan (Tg. Pandan)	Tanjung Pandan	1,18
68	018.4 K	Basuki Rahmat (Tg. Pandan)	Tanjung Pandan	0,96
69	018.5 K	Sriwijaya (Tg. Pandan)	Tanjung Pandan	1,39
70	018.6 K	Sijuk (Tg.Pandan)	Tanjung Pandan	2,44
71	026.1	Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)	Tanjung Pandan, Sijuk	20,94
72	026.2	Simpang Empat (Sijuk) - Buding	Kelapa Kampit, Sijuk	30,35
73	018.7	Junction - Membalong	Tanjungpandan - Membalong	47,04
74	018.8	Bantan - Pelulusan	Membalong - Dendang	11,50
75	020.1	Badau - Dendang	Badau - Dendang	35,99
76	020.2	Dendang - Gantung	Dendang - Gantung	36,96
77	019.1	Perawas - Buding	T.Pandan - Kelapa Kampit - Damar	30,31
78	019.2	Buding - Manggar	Perawas - Manggar	43,85
79	020.3	Sp.Renggiang - Gantung	Renggiang - Gantung	18,10
80	020.4	Gantung - Sp. Padang	Gantung - Manggar	16,58
Total				850,99

Bidang Sumberdaya Air

Kinerja Pelayanan Bidang Sumber Daya Air menyangkut :

1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku.
2. Membuat konstruksi bangunan penyediaan air baku dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik alamiah sumber air baku yang ada.
3. Melakukan inspeksi kondisi prasarana penyediaan air baku.

4. Mengkaji ulang dokumen perencanaan untuk pengembangan jaringan irigasi kewenangan Provinsi.
5. Membuat konstruksi jaringan irigasi dan rawa dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik alamiah areal pertanian.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan bangunan jaringan irigasi dan rawa.
7. Melakukan inspeksi kondisi jaringan irigasi dan rawa terbangun, survei angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan, dan sistem kinerja layanan jaringan irigasi dan rawa.
8. Mengoptimalkan infrastruktur konservasi sumber air yang sudah ada melalui operasional dan pemeliharaan yang memadai.
9. Menyusun dokumen perencanaan pengendalian banjir
10. Membuat konstruksi pengendalian banjir memperhatikan karakteristik alamiah sungai yang ada
11. Mengoptimalkan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada melalui rehabilitasi/rekonstruksi, pemeliharaan, dan normalisasi saluran/sungai
12. Menyusun dokumen perencanaan pengamanan pantai
13. Membuat konstruksi pengamanan pantai/pemecak ombak dengan memperhatikan karakteristik alamiah pantai yang ada
14. Mengoptimalkan infrastruktur pengamanan pantai yang sudah ada melalui operasional dan pemeliharaan yang memadai
15. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian banjir dan pengamanan pantai
16. Melakukan inspeksi kondisi prasarana pengendali banjir
17. Melakukan inspeksi kondisi kerusakan pantai
18. Membuat konstruksi turap/talud/bronjong pada kawasan rawan bencana/banjir
19. Menyusun tahapan penataan sarana dan prasarana irigasi serta pencegahan dampak.
20. Melakukan evaluasi kinerja kegiatan tahun berjalan untuk rekomendasi kegiatan tahun berikutnya.

Daerah Aliran Sungai

Dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengelola prasarana dan sarana sumber daya air di Bangka Belitung, sebagai berikut :

1. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, kewenangan pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Tabel 2.6 Wilayah Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Wilayah Sungai	Unit Pengelola	Kewenangan
1	Baturusa (WS Pulau Bangka)	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	Pemerintah Pusat
2	Cerucuk (WS Pulau Belitung)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi

Sumber : Permen PUPR 04/PRT/M/2015

b. Daerah Aliran Sungai

Potensi air permukaan berupa aliran sungai di Wilayah Sungai Pulau Bangka sebanyak 17 DAS utama seperti tersaji dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.7. Daftar Sungai Utama di WS Pulau Bangka

No.	Nama Sungai	Luas DAS (Km ²)
1	S. Baturusa	648.844
2	S. Mecong	624.127
3	S. Kurau	570.321
4	S. Jeruk	535.324
5	S. Selan	527.550
6	S. Bangka Kota	521.934
7	S. Kepoh	454.804
8	S. Menduk	387.284
9	S. Layang	359.584
10	S. Kampak	357.642
11	S. Balar	348.492
12	S. Nyireh	299.243
13	S. Semubur	282.220
14	S. Ulim	255.945
15	S. Antan	194.722
16	S. Gusung	191.381
17	S. Nibung	148.814

Sumber : BBWS VIII Tahun 2010

Potensi air permukaan berupa aliran sungai di WS Belitung adalah sekitar 606,46 m³/dt. Dalam pengelolaannya, potensi sungai WS Belitung dibagi menjadi 2 Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS yaitu SWP DAS Cerucuk dan SWP DAS Lenggang, yang masing-masing disajikan dalam Tabel 2.11 dan Tabel 2.12.

Tabel 2.8. Potensi Sungai di SWP DAS Cerucuk

No.	Nama DAS	Sungai Utama	Luas DAS (ha)	Debit
				Rerata (m ³ /det)
1	DAS Batubadinding	S. Batubadinding	1,772.10	2.27
2	DAS Belian	S. Belian	633.00	0.81
3	DAS Biduk	S. Biduk	1,249.50	1,249.50
4	DAS Buding	S. Buding	69,261.00	88.67
5	DAS Bulin	S. Bulin	1,804.30	2.31
6	DAS Burung Mandi	S. Burung Mandi	2,489.60	3.19
7	DAS Cerucuk	S. Cerucuk	38,936.40	49.85
8	DAS Keladi	S. Keladi	138.80	0.18
9	DAS Kubu	S. Kubu	409.00	0.52
10	DAS Kumbe	S. Kumbe	206.00	0.26
11	DAS Lengir	S. Lengir	5,806.10	7.43
12	DAS Mang	S. Mang	1,351.50	1.61
13	DAS Membalong	S. Membalong	14,468.50	18.52
14	DAS Mendanau	S. Mendanau	14,948.80	19.14
15	DAS Mensuci	S. Mensuci	3,827.30	4.90
16	DAS Mentigi	S. Mentigi	2,173.60	2.78
17	DAS Munun	S. Munun	3,595.50	4.60
18	DAS Naduk	S. Naduk	3.30	0.00
19	DAS Naga	S. Naga	78.50	0.10
20	DAS Nayo	S. Nayo	1,609.90	2.06
21	DAS Nyuruk	S. Nyuruk	1,505.40	1.93
22	DAS Pemukul	S. Pemukul	3,384.80	4.33
23	DAS Pendas	S. Pendas	2,257.50	2.89
24	DAS Penjilin	S. Penjilin	493.20	0.63
25	DAS Rada	S. Rada	374.30	0.48
26	DAS Rusa	S. Rusa	886.70	1.14
27	DAS Sabong	S. Sabong	1,753.40	2.24
28	DAS Sagu	S. Sagu	14,242.20	18.23

No.	Nama DAS	Sungai Utama	Luas DAS (ha)	Debit Rerata (m ³ /det)
29	DAS Samak	S. Samak	210.80	0.27
30	DAS Sapei (DAS Brang)	S. Sapei	2,984.90	3.82
31	DAS Sijuk	S. Sijuk	3,041.90	3.89
32	DAS Sit	S. Sit	508.20	0.65
33	DAS Tanjung Asem	S. Tanjung Asem	2,535.50	3.25
34	DAS Tanjungbinga	S. Tanjungbinga	105.00	0.13
35	DAS Terung	S. Terung	208.60	0.27
36	DAS Tiris	S. Tiris	217.10	0.28
37	DAS Ulim Kecil	S. Ulim Kecil	2.70	0.00
Jumlah				255.26

Sumber : BPDAS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2013

Tabel 2.9. Potensi Sungai di SWP DAS Lenggang

No.	Nama DAS	Sungai Utama	Luas DAS (ha)	Debit Rerata (m ³ /det)
1	Das Banten (DAS Kembiri)	S. Banten	19,168.80	24.54
2	Das Kubing	S. Kubing	8,494.40	10.87
3	Das Ulim Besar	S. Ulim Besar	902.58	1.16
4	Das Suge	S. Suge	3,307.34	4.23
5	Das Seliu	S. Seliu	1,658.04	2.12
6	Das Empalak	S. Empalak	536.54	0.69
7	Das Ungu (DAS Pala)	S. Pala	12,414.00	15.89
8	Das Sekayu	S. Sekayu	8,946.10	11.45
9	Das Langir	S. Langir	888.10	1.14
10	Das Lenggang	S. Seranggas	102,581.00	131.33
11	Das Limbungan	S. Limbungan	20,526.20	26.28
12	Das Dendang	S. Dendang	2,687.10	3.44
13	Das Pesak (DAS Senusur)	S. Senusur	10,433.50	13.36
14	Das Kebal	S. Kebal	11,375.90	14.56
15	Das Kelumpang	S. Kelumpang	1,023.95	1.31
16	Das Pakem	S. Pakem	931.30	1.19
17	Das Getah	S. Getah	5,458.60	6.99
18	Das Tanjung Batu Itam	S. Tanjung Batu Itam	847.40	1.08

No.	Nama DAS	Sungai Utama	Luas DAS (ha)	Debit Rerata (m ³ /det)
19	Das Tanjung Batu Air	S. Sembulu	12,344.32	15.80
20	Das Oma Tengka	S. Oma Tengka	1,761.80	2.26
21	Das Ngarawan	S. Ngarawan	4,901.00	6.27
22	Das Manggar	S. Manggar	42,202.30	54.03
23	Das Kripit	S. Kripit	935.70	1.20
Jumlah				351.20

Sumber : BPDAS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2013

2. Irigasi

Jaringan irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola dan menjadi kewenangan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten antara lain yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Pengelolaan status daerah irigasi yang menjadi kewenangan tersebut dilakukan dengan pekerjaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi.

- a. Status daerah irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Pusat sebanyak 2 (dua) Daerah Irigasi luasan baku/rencana seluas 6.100 ha dan 2 (dua) Daerah Irigasi Rawa seluas 9.000 ha dengan jumlah luasan keseluruhan 15.100 ha.
- b. Status daerah irigasi yang dapat dikelola dan menjadi tanggung jawab serta wewenang Pemerintah Provinsi sebanyak 3 (tiga) D.I. dengan luasan baku/rencana 3.350 ha, dan 7 (tujuh) D.I.R dengan luasan 12.144 ha.

3. Potensi air permukaan berupa kolong

Kolong yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung keberadaannya menyebar di seluruh Kabupaten/Kota. Kolong adalah potensi genangan air yang terdapat pada danau-danau bekas penambangan timah yang membentuk kolam dengan kedalaman tertentu.

- a. Di Kota Pangkalpinang terdapat 91 Kolong dengan luas 395,14 ha dan volume tampungan 28.772.900 m³.
- b. Di Kabupaten Bangka terdapat 301 kolong dengan luas 432,26 ha dan volume tampungan 70.606.600 m³.
- c. Di Kabupaten Bangka Selatan terdapat 45 kolong dengan luas 76,85 ha dan volume tampungan 12.806.00 m³.

- d. Di Kabupaten Bangka Tengah terdapat 76 kolong dengan luas 277,52 ha dan volume tampungan 10.393.900 m³.
- e. Di Kabupaten Bangka Barat terdapat 122 kolong dengan luas 212,96 ha dan volume tampungan 6.453.770 m³.
- f. Di Kabupaten Belitung terdapat 45 kolong dengan luas 604,8 ha dan volume tampungan 16.717.320 m³.
- g. Di Kabupaten Belitung Timur terdapat 21 kolong dengan luas 101,60 ha dan volume tampungan 649.960 m³.

Kuantitas ketersediaan air permukaan WS Bangka dan WS Belitung sangat besar sehingga masih perlu ditingkatkan pemanfaatannya, mengingat pemanfaatan eksisting masih sangat kecil. Namun potensi ketersediaan air permukaan tersebut tidak serta merta secara langsung dapat dimanfaatkan, karena kualitas air permukaan tersebut harus melalui uji kualitas air dan memenuhi standar baku mutu air yang ditentukan terlebih dahulu.

Kolong sangat penting dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air baku penduduk, pemanfaatan air untuk irigasi, perkebunan dan perikanan. Beberapa kolong yang diuji untuk penggunaan keperluan air baku tidak disarankan, kecuali dengan menggunakan instalasi pengolahan air baku yang memadai dengan menaikkan baku mutu airnya.

4. Kawasan yang beresiko terdampak banjir dan Abrasi Pantai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkisar pada ketinggian 0 – 25 m dpl untuk WS Pulau Bangka, dan 0-10 m dpl untuk WS Pulau Belitung. Keadaan banjir dan genangan seringkali terjadi pada Kota Pangkalpinang, disamping karena intensitas yang tinggi di hulu Wilayah Sungai juga karena daerah tersebut merupakan dataran rendah serta pertemuan sungai dan anak-anak sungainya. Untuk daerah hilir baik di Kabupaten-Kabupaten atau Kota di Pulau Bangka kejadian banjir dan banjir rob juga dipengaruhi oleh pasang surut muka air laut, sehingga pada saat muka air laut naik sungai yang akan masuk ke laut akan terganggu. Kejadian banjir terjadi pada daerah hilir sungai di Pulau Belitung baik di Kabupaten Belitung maupun Kabupaten Belitung Timur, karena tingkat sedimentasi sungai yang besar serta disebabkan pasang surut muka air laut.

Kerusakan pantai karena abrasi atau erosi dapat disebabkan oleh peristiwa geologi, non geologi dan faktor manusia. Jumlah Pantai pada WS Pulau Bangka teridentifikasi sebanyak 45 pantai dengan panjang ± 109 km, sedangkan WS Pulau Belitung teridentifikasi 19 pantai dengan panjang ± 83,300 km. Kategori kerusakan umumnya disebabkan oleh gelombang tegak lurus pantai, penambangan pasir dan timah dan vegetasi banyak ditebang. Beberapa pantai telah dilakukan penanganan dengan menggunakan struktur pengamanan

pantai berupa revetment, dan kombinasi groin dan pemecah gelombang (breakwater) serta penanaman vegetasi pantai.

Bidang Jasa Konstruksi

Kinerja Pelayanan Bidang Jasa Konstruksi menyangkut :

1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian program, fasilitasi, survey dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
2. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
3. Penyelenggaraan pembinaan lembaga pengembang jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi
4. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian peningkatan kemampuan teknologi, pengguna dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi
5. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
6. Penyelenggaraan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi
7. Penyelenggaraan pembuat konsep pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
8. Penyelenggaraan pengkajian ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (nspk) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
9. Penyelenggaraan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitas jasa konstruksi kabupaten/kota
10. Penyelenggaraan pembinaan program, fasilitas, survey dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (nspk) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
11. Penyelenggaraan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi
12. Penyelenggaraan pengawasa tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Isu Strategis Kabupaten/Kota

Isu strategi adalah hal-hal yang menjadi persoalan dan potensi utama yang mempunyai dampak luas, dalam kaitan ini tentunya berkenaan dengan penataan suatu ruang wilayah. Isu strategis ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi

rumsan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang. Mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 7 kabupaten dan satu kota, maka perumusan isu strategis diawali dengan mengidentifikasi isu strategis tiap-tiap daerah, selanjutnya akan dikelompokkan (clustering) menjadi isu-isu provinsi.

Adapun isu-isu strategis masing-masing daerah yang dimaksud adalah sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Isu Strategis Kabupaten Bangka

1. Pemenuhan standar kelayakan dan pelayanan jalan menurut aturan Kementerian Pekerjaan Umum yang belum dapat sepenuhnya terpenuhi
2. Pengembangan Kawasan industri Jeltik di Kecamatan Sungailiat dan Kawasan ekonomi terpadu di kawasan Teluk Belinyu.
3. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas daerah di bidang pertanian yang menjadi *leading sector*, maka perlu pembentukan agropolitan di daerah atau kawasan yang sesuai.
4. Sektor pertambangan telah lama menjadi sektor utama di Kepulauan Bangka Belitung, begitu pula di Kabupaten Bangka, namun sebagai sumberdaya yang tidak terbarukan maka sektor pertambangan mempunyai masa berlaku. Setelah masa berlaku habis maka proses reklamasi dan rehabilitasi di lokasi galian menjadi isu penting dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka
5. Di Kabupaten Bangka banyak terdapat lokasi yang dapat dijadikan tujuan objek wisata, baik itu wisata alam, wisata religius, wisata bahari maupun wisata sejarah

Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat

1. Penurunan daya dukung daerah aliran sungai dalam menahan dan menyimpan air, akibatnya dirasakan juga dibagian hilir dikawasan pantai, dengan terjadinya abrasi yang semakin lama semakin menjorok kegaris pantai.
2. Penurunan kapasitas infrastruktur penampung air sebagai akibat meningkatnya sedimentasi sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku.
3. Terbatasnya sistem pengendalian banjir, pengelolaan air baku, penanganan abrasi pantai
4. Peningkatan kondisi jalan mantap
5. Adanya program pusat pembukaan lahan cetak sawah
6. Adanya komitmen pemerintah Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat - pusat pertumbuhan ekonomi;

Isu Strategis Kabupaten Bangka Tengah

1. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik,sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.
2. Peningkatan infrastruktur sistem jaringan jalan kabupaten yang berada pada kawasan hutan. Berdasarkan SK Menhut Nomor 798/Menhut-II/2012, sistem jaringan jalan Kabupaten yang berada pada Kawasan Hutan sepanjang 108,37 Km. Dengan adanya SK Menhut ini maka peningkatan jalan untuk memperlancar arus transportasi pada area permukiman penduduk menjadi lambat karena perlu adanya tahap pinjam pakai atau alih fungsi kawasan hutan.
3. Pembangunan ruas jalan lingkaran Nibung – Namang sepanjang 35,46 Km. Pembangunan Jalan lingkaran yang pada tahun 2016 telah dilaksanakan Feasibility Study (FS) untuk link Nibung – Kurau sepanjang 29,8 Km. Dari hasil analisis FS salah satu dasar adalah saat ini ruas jalan Namang – Koba (Jalan Kolektor Primer I) yang sepanjang ± 15 Km rawan terjadinya abrasi pantai. Dimana berdasarkan data teknis abrasi pantai di Pulau Bangka setiap tahun sebesar 1 meter. Kemudian dengan adanya pembangunan jalan baru diharapkan masyarakat dapat membangun permukiman baru diluar dari sempadan pantai.
4. Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan wilayah sungai/DAS terkait penanganan banjir antar wilayah ,sehingga tidak terjadinya penurunan daya dukung lingkungan akibat kesalahan pengelolaan lingkungan seperti aktivitas tambang ilegal yang menyebabkan pendangkalan palung sungai yang kemudian dapat menyebabkan banjir.
5. Belum terpenuhinya pemenuhan air irigasi pada musim kemarau dikarenakan adanya kendala lahan untuk perluasan embung/waduk.Lahan sekitar embung juga banyak ditanami oleh warga dengan tanaman yang menyerap air seperti sawit sehingga menurunkan cadangan air dalam embung/waduk.
6. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara drainase yang telah terbangun sehingga belum semuanya drainase dalam kondisi baik
7. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi RDTR tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang lebih rinci;
8. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
9. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

10. Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan/rencana pemanfaatan ruang.
11. Masih rendahnya luasan tanah yang memiliki sertifikat sehingga rentan terhadap terjadinya sengketa kepemilikan tanah.
12. Belum optimalnya pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah sebagai penggerak ekonomi daerah.

Isu Strategis Kabupaten Bangka Selatan

1. Masih rendahnya optimalisasi rute dalam pembangunan infrastruktur jalan
2. Belum adanya sistem irigasi teknis dan belum optimalnya sistem irigasi semi teknis
3. Belum memadainya sumber-sumber air primer untuk pengairan sawah
4. Belum optimalnya sistem jaringan drainase
5. Terlambatnya adaptasi pemanfaatan lahan/kawasan terhadap peruntukan ruang
6. Masih terjadinya inkonsentrasi spasial akibat tumpang tindih pemanfaatan ruang

Isu Strategis Kabupaten Belitung

1. Belum optimalnya ketersediaan database Pekerjaan umum
2. Belum Optimalnya pembangunan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah khususnya terkait pembebasan lahan
3. Belum optimalnya sistem jaringan drainase skala kawasan
4. Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan prasarana sarana air bersih untuk menunjang penyediaan kebutuhan air bersih
5. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian
6. Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan jaringan irigasi
7. Belum optimalnya peningkatan dan pemeliharaan jalan jaringan jalan
8. Percepatan pembinaan tenaga kerja konstruksi

Isu Strategis Kabupaten Belitung Timur

1. Masih terdapat jalan kabupaten dalam kondisi rusak yang perlu diperbaiki dengan program peningkatan jalan
2. Pembangunan jaringan/akses jalan yang belum optimal dikawasan pariwisata
3. Rusak daerah aliran sungai akibat penambangan liar bahan logam dibadan sungai
4. Belum terukurnya luasan daerah irigasi yang dapat dialiri oleh air irigasi
5. Masih kurangnya kapasitas tampung penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat
6. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, dan daerahrawan air

7. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan
8. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan system air limbahterpusat (*system sewerage*)
9. Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan

Isu Strategis Kota Pangkalpinang

1. Pembangunan Outer Ring Road Barat
2. Kawasan Industri; Kawasan Pelabuhan; Kawasan Wisata
3. Rencana Reklamasi Pantai - Water front city Pantai Pasir Padi/Rencana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam)
4. Isu perbatasan (Kawasan perkantoran Prov) Pangkal Pinang & Bangka Tengah
5. Potensi fisik seperti kondisi morfologi yang relatif datar;
6. Potensi perekonomian seperti peningkatan aktivitas perdagangan, aktivitas industri dan potensi perikanan yang masih besar
7. Permasalahan fisik seperti berada di cekungan yang rawan banjir, kolong-kolong yang belum termanfaatkan secara tepat, Kondisi air tanah kurang baik.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis tahun 2023 – 2026 berasal dari lingkungan internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Namun demikian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis 2023 – 2026 menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis tahun 2023 – 2026. Permasalahan ini disebabkan oleh adanya permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan – permasalahan yang disebabkan berasal dari lingkungan internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di uraikan sebagai berikut :

a. Bidang SDA

- Keterbatasan Sumber SDM yang berkompeten.
- Belum optimalnya pengelolaan sistem air baku dan jaringan distribusi yang memadai pada pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan serta pada kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah, kawasan TPA regional dan kawasan-kawasan strategis provinsi.
- Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur jaringan irigasi yang mendukung ketahanan pangan provinsi.
- Belum optimalnya pengendalian kerusakan akibat erosi dan abrasi pada pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan, lokasi rawan bencana pada daerah aliran sungai dan pesisir pantai serta pada kawasan-kawasan strategis provinsi.
- Belum optimalnya revitalisasi dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air akibat bencana yang disebabkan oleh daya rusak air.
- Rendahnya regulasi, forum pengelolaan sumber daya air yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.

- b. Bidang Bina Marga
- Kapasitas sumber daya manusia masih kurang memadai secara kualitas dibandingkan dengan permasalahan yang harus ditangani.
 - Belum tersedianya database tentang sistem jaringan jalan dan jembatan yang valid dan lengkap serta pemanfaatan informasi tentang kondisi infrastruktur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - Sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan masih kurang memadai secara kualitas maupun kuantitas.
 - Penerimaan retribusi tidak seimbang dengan biaya operasional pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - Rendahnya aksesibilitas jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.
 - Rendahnya realisasi rencana aksesibilitas jalan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat serta terbatasnya akses jalan bagi masyarakat daerah terpencil dan pesisir.
 - Belum optimalnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan terutama pada jalur-jalur ekonomi Produktif.
 - Perlu adanya peningkatan kapasitas berupa pelebaran jalan nasional dan provinsi.
 - Ruas jalan yang masih terbentur dengan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan alternatif peruntukan lain.
- c. Bidang Sekretariat
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program infrastruktur ke-PU-an pada instansi terkait termasuk pemerintah pusat, pemerintah kota/pemerintah kabupaten.
 - Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang ke-PU-an belum optimal.
 - Kurangnya data dan informasi kegiatan di bidang ke-PU-an.
- d. Bidang Jasa Konstruksi
- Kurangnya SDM jasa konstruksi.
 - Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.
 - Belum optimalnya pengawasan jasa konstruksi.
 - Belum optimalnya sistem informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi.
 - Kurangnya tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikasi.
 - Belum adanya regulasi NSPK pengembangan jasa konstruksi.
- e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

- Terbatasnya jumlah Kompetensi SDM dengan kemampuan dan keterampilan bidang perencanaan Tata Ruang, Pemetaan dan Pengukuran.
 - Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.
 - Belum maksimalnya perencanaan pemanfaatan penataan ruang
 - Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi.
 - Adanya kebijakan baru terkait pengembangan kawasan yang tidak diakomodir dalam Perda RTRW No 2 tahun 2014.
 - Tingginya konflik pertanahan.
 - Kurangnya SDM pertanahan.
 - Regulasi pertanahan yang selalu berubah.
 - Penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja bidang Pemanfaatan ruang dan pertanahan.
 - Kepastian hukum hak atas tanah.
- f. Bidang Ciptakarya, Perumahan dan Permukiman
- Belum seluruh penduduk di lintas daerah kabupaten/kota mendapatkan akses air minum yang layak.
 - Akses sanitasi yang layak belum memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik regional, pengolahan persampahan regional sesuai standard dan ramah lingkungan.
 - Belum tersedianya grand desain penyediaan. infrastruktur di kawasan strategis provinsi.
 - Belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kawasan strategis Provinsi.
 - Belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kawasan Permukiman.
 - Fasilitasi peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah sasaran yang terbatas sesuai dengan keterbatasan anggaran secara nasional sehingga penyelesaian penanganan RTLH tidak dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
 - Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan.
 - Terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat kurang mampu.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

A. Telaahan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2023 – 2026 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. ***Unggul*** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. ***Teknologi*** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

B. Telaahan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas,

maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023 – 2026, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

3.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap misi RPJMD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Tujuan:

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran :
 - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha).
 - Ketersediaan Air Baku (M3).
 - b. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Jumlah kunjungan kapal di pelabuhan laut.
 - Jumlah armada pengangkutan.
 - Persentase jalan kondisi mantap.

Misi II : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Tujuan :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan.
 - Tingkat kapabilitas APIP.
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat.
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat.
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN.
 - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM).
 - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Skor aspek kebebasan sipil.
 - Skor aspek hak-hak politik.
 - Skor aspek lembaga demokrasi.

3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026, disusun berdasarkan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis dan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka telah dirumuskan program unggulan daerah yang menjadi program prioritas pembangunan

daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2023 - 2026. Adapun program unggulan yang menjadi prioritas tersebut yaitu :

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. Pembangunan Bahari

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. Pengembangan Pariwisata

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city.

4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pemdampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghapusan para tengkulak dan rentenir.

7. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

8. Pembangunan Pendidikan

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB)

sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel.

9. Pembangunan Kesehatan

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentid khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanan Publik

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutamakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan.

11. Pembangunan Berdemokrasi

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembutan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi.

12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab

dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. Pengendalian Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan Renstra Kabupaten / Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2015–2019 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan. Adapun visi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah *“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”*

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2019, di mana infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional. Adapun misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumberdaya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktifitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas untuk berkesinambungan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumberdaya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumberdaya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasi yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PUPR, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PUPR dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan, konektivitas daratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.

5. Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumberdaya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh sasaran strategis yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing ; layanan infrastruktur dasar dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar lingkup pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

3.3.2. Telaahan Renstra Kabupaten / Kota

Kabupaten Bangka Tengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Bangka Tengah selama lima tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sementara itu rumusan pernyataan strategi OPD dalam lima tahun mendatang adalah Peningkatan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan Kabupaten melalui program peningkatan jalan dan jembatan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Strategi selanjutnya adalah Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air baku melalui program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. Untuk Mengurangi luasan Kawasan rawan banjir, strategi yang dilakukan dengan menjalankan program Pengendalian Banjir dan Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong. Terkait dengan percepatan pengembangan kawasan strategis, dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Bangka Tengah membuat Program Pengembangan Wilayah strategis cepat tumbuh. Sedangkan strategi selanjutnya adalah Peningkatan keteraturan dalam penyelenggaraan pertanahan melalui program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Kabupaten Bangka

Dalam mendukung visi misi bupati Bangka, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan memiliki misi mewujudkan pemerataan pelayanan infrastruktur yang handal, mewujudkan tata kelola ruang yang optimal, mewujudkan pelayanan sistem jaringan transportasi yang handal dan terpadu serta mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Melalui misi ini, OPD yang bersangkutan menyusun strategi dan arah kebijakan yakni meningkatkan pelayanan infrastruktur proporsi panjang jaringan jalan , jembatan, drainase dan irigasi, Melaksanakan perencanaan , pemeliharaan dan peningkatan dan pembangunan sarana irigasi. Terlaksananya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar.

Kabupaten Bangka Barat

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, maka urusan Pekerjaan Umum, urusan Perumahan dan urusan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD berkewajiban untuk mendukung pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, makamisi Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah urusan Pekerjaan Umum, urusan Perumahan dan urusan Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat yang kemudian disusun dalam rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Kabupaten Bangka Selatan

Dalam upaya mewujudkan visi misi Bupati Bangka Selatan, OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan di kabupaten setempat menyatakan strategi Meningkatkan penataan penyehatan/sanitasi kawasan pemukiman dan kebutuhan air bersih, Meningkatkan kualitas jalan konektor, jalan pemukiman dan jembatan pemukiman masyarakat, Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan konektor/jembatan dan mempercepat pembukaan ruas jalan Trans Basel dalam deliniasi Kawasan Strategis Industri Sadai, Meningkatkan sarana irigasi di kawasan sentra produksi, Optimalisasi pengelolaan sumber air baku. meningkatkan pengendalian tata ruang berbasis aplikasi sistem informasi ketataruangan.

Kabupaten Belitung

Visi dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah Terwujudnya pengembangan wilayah dengan dukungan prasarana perhubungan jalan yang

mantap dan berkembangnya kawasan perdesaan dan perkotaan serta meningkatkan pemberdayaan sumberdaya air demi kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mencapai visi ini, OPD tersebut menetapkan kebijakan penyediaan sumber daya Ke-PU-an yang bermutu, merata dan terjangkau sejalan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan / kemampuan masyarakat, Peningkatan pelayanan bidang ke-PU-an dengan perluasan jangkauan pelayanan dan peningkatan mutu, mewujudkan kualitas lingkungan yang kondusif untuk hidup aman dan nyaman, mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara sistematis untuk menjamin pembangunan bidang ke-PU-an yang terpadu dan menyeluruh, Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk rencana dan / atau program strategis yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan dengan tujuan agar keputusan terhadap rencana dan/atau program tersebut terorientasi pada prinsip berkelanjutan dan lingkungan hidup.

Kabupaten Belitung Timur

Dalam mencapai sasaran dan target kinerja dalam kurun lima tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun beberapa strategi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, serta menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam mencapai visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahunan(2016-2021), maka strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi, dirumuskan adalah Mengoptimalkan pengorganisasian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan pelayanan pembangunan, Meningkatkan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel, Pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam hal aksesibilitas masyarakat melalui peningkatan kualitas jalan dan pembangunan jalan baru, Mengendalikan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan pelestarian sumber daya air dan Peningkatan upaya rehabilitasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di kawasan sungai dan pantai, Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dengan arah kebijakan serta strategi Pewilayahan komoditas melalui kebijakan Menumbuhkembangkan kawasan komoditas berbasis kecamatan/ pedesaan, Peningkatan aksesibilitas, keamanan, dan keragaman pangan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi.

Pusat-pusat kegiatan pada wilayah provinsi merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas:

- PKN yang berada di wilayah provinsi;
- PKW yang berada di wilayah provinsi;
- PKSN yang berada di wilayah provinsi; dan
- PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi berfungsi:

- Sebagai pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah provinsi yang memberikan layanan bagi wilayah kabupaten dan wilayah kota yang berada dalam wilayah provinsi; dan
- Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana antarwilayah kabupaten/kota yang juga menunjang keterkaitan pusat Kabupaten/Kota antarwilayah Provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial, ekonomi;
- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- Kedudukan provinsi di dalam wilayah yang lebih luas; dan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;

Pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah provinsi memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat yang terdiri atas: PKN, PKW, dan PKSN yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;

- Memuat penetapan PKL; dan
- Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah provinsi serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan.
- Memuat pusat-pusat kegiatan selain yang dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN (dengan notasi PKNp);
 - b) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW (dengan notasi PKWp);
 - c) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKNp hanya pusat kegiatan yang sudah berstatus PKW;
 - d) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKWp hanya kotakota yang memenuhi persyaratan PKL; dan
 - e) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan mengindikasikan program pembangunannya ke dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKN atau PKW.
 - f) Pusat permukiman di dalam kawasan perkotaan metropolitan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai PKN dapat ditetapkan menjadi PKL dalam sistem pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah provinsi sesuai dengan fungsi yang diemban dalam skala provinsi;

Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas sistem prasarana utama pembentuk ruang dan sistem prasarana lainnya:

Peta Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar 3.1 berikut ini.



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya dan kawasan lindung; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan rencana rincinya;
- b. mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
- c. memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- d. mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya:

Kawasan lindung, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
- e. kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- f. kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Kawasan budi daya, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
- d. kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi;
- e. kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya;
- h. kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;
- i. kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan; dan

- j. peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

Rencana pola ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar 2 berikut :



Gambar 3.2.

Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

C. Penetapan Kawasan Strategis

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- tata ruang di wilayah sekitarnya;
- kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis provinsi berfungsi:

- untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan;
- sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup lingkungan hidup wilayah provinsi; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kawasan strategis Provinsi ditetapkan dengan kriteria:

- a. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- b. memperhatikan kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di wilayah provinsi;
- c. dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- d. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - potensi ekspor;
 - dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau
 - fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
- e. dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi;
- f. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial antara lain kawasan yang:
 - merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- g. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi, antara lain:

- diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - memiliki sumber daya alam strategis;
 - memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
 - memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- h. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, seperti halnya kawasan yang:
- merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
 - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - merupakan kawasan rawan bencana alam; atau
 - merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- i. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi.

Jenis-jenis kawasan strategis yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan **pertumbuhan ekonomi** yang terdiri dari:
- kawasan tertinggal di kecamatan Payung, Air Gegas, dan Simpang Rimba;
 - kawasan pusat kegiatan ekonomi berbasis budidaya perikanan darat dan perikanan laut di kecamatan Lepar Pongok, Kelapa Kampit, dan Dendang;
 - kawasan pusat kegiatan ekonomi berbasis budidaya perkebunan di kabupaten Bangka Barat, khususnya di Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip dan Tempilang;
 - kawasan pelabuhan nasional di Tanjung Batu
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pelestarian **daya dukung lingkungan**, yang terdiri dari:
- kawasan kritis, khususnya di sekitar “kolong” bekas kegiatan penggalian timah konvensional yang lokasinya tersebar, baik di daratan Pulau Bangka maupun Pulau Belitung;

- kawasan konservasi budaya, yang berupa bangunan budaya bersejarah di Kecamatan Muntok; dan
- kawasan wisata pantai dan laut di kecamatan Sungai Liat.

Gambar 3.3.

Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi



3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyusunan RPJMD 2023 – 2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023 – 2026 dilakukan dengan mengkaji materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terdapat dalam RPJMD 2023 – 2026 . Kajian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan isu pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas, identifikasi dan analisis materi kebijakan, rencana, dan/atau program di dalam RPJMD terhadap isu prioritas, analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup, perumusan mitigasi, alternatif perbaikan, hingga perumusan rekomendasi perbaikan materi kebijakan, rencana, dan/atau program.

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil keseluruhan proses KLHS. Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan beberapa rekomendasi KLHS yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD 2023 – 2026 , sebagai berikut.

1. Merevisi beberapa indikator kinerja program pada beberapa kebijakan umum, antara lain:
 - a) Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat Belinyu, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok,

- Pengembangan Kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok tidak perlu adanya kegiatan pembangunan pemecah gelombang. Sebagai kompensasinya, pemecah gelombang alami berupa hutan mangrove yang masih ada perlu dipertahankan dan ditambah ketebalannya.
- b) Pengembangan kawasan mandiri terpadu (KTM Batu Betumpang dan KTM Gantung) perlu memasukkan indikator tingkat produktivitas pertanian dan tingkat kesejahteraan petani (transmigran).
 - c) Pada Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Sektor Kelautan dan Perikanan; Peningkatkan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Produk Pertanian Khususnya Komoditas Karet, Lada dan Sapi; serta Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Kepariwisata; indikatornya perlu dibuat lebih rinci dan perlu disebutkan lokasi kegiatan.
 - d) Judul kebijakan umum Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Kepariwisata perlu diganti menjadi Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Kepariwisata
 - e) Pada kebijakan umum Peningkatkan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Industri Pengolahan Sumber Daya Alam Pertambangan Khususnya Sumberdaya Alam Pertambangan Timah, untuk indikator kinerja Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah diubah menjadi Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah dan mineral ikutannya.
2. Memasukkan program pencegahan dan mitigasi bencana di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Gantung.
 3. Mengintegrasikan rumusan mitigasi dan/atau alternatif kedalam bentuk program-program disertai dengan indikator-indikator, waktu pelaksanaan dan pembiayaannya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif.
 4. Setiap rencana pengembangan kawasan strategis perlu didahului dengan penyusunan rencana induk pengembangan (RIP) dan rencana strategis (renstra) dan dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebelum dilakukan pembangunan fisik.
 5. Untuk beberapa kebijakan yang berlokasi di area yang di dalamnya terdapat kawasan lindung, seperti: 1) Pengembangan kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga, 2) pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera, 3) Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat, dan 4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka, perlu memilih lokasi yang sesuai

dengan peruntukannya dengan tidak mengganggu area kawasan lindung yang ada di dalamnya.

6. Pemerintah Provinsi harus segera menerbitkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai pedoman penggunaan ruang pesisir dan laut untuk mendukung sejumlah kebijakan pengembangan kawasan strategis yang berada di wilayah pesisir dan laut.
7. Dalam pengembangan kawasan peruntukan pariwisata perlu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, mengingat sebagian besar lokasi pengembangan sudah dikelola oleh masyarakat melalui BUMDes maupun karang taruna.
8. Pemerintah Provinsi perlu memetakan dan menetapkan kawasan produksi pangan provinsi agar kebijakan/program pemantapan ketahanan pangan lebih fokus pada kawasan tertentu dan mencegah terjadinya perubahan peruntukan kawasan pertanian untuk kepentingan non pertanian.
9. Pemerintah provinsi perlu segera mengidentifikasi dan menginventarisasi kawasan lindung yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah terjadinya okupasi oleh masyarakat dan perubahan fungsi lindung. Selanjutnya hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dikukuhkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Lindung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan di masa datang, pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun instalasi pengolahan air bersih beserta jaringan penyalurannya dengan air baku berasal dari air permukaan seperti air kolong dan air sungai terdekat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, sertapermasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunankarena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidakdiantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

3.5.1. Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Rumusan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan atas telaahan pencapaian Renstra K/L dan kabupaten/kota. Selain itu terdapat dokumen RTRW dan KLHS yang menjadi bahan pertimbangan untuk pemetaan program Pembangunan Infrastruktur. Adapun sejumlah isu-isu strategis bidang Pekerjaan Umum adalah :

A. Bidang Bina Marga

1. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan untuk mengantisipasi kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang tinggi dalam rangka menunjang pergerakan arus barang dan jasa.
2. Kondisi jalan/jembatan yang belum mantap dan belum terbuka terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Penurunan kualitas dan tingkat pelayanan jalan/jembatan.
4. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan.
5. Kebutuhan Peningkatan status ruas jalan.
6. Belum optimalnya infrastruktur ke-PU-an dari kerawanan bencana.

B. Bidang Sumber Daya Air

1. Belum Optimalnya kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
2. Kurang tersedianya infrastruktur pengaman pantai dan saluran pembuang serta sumber air baku.
3. Perluasan jangkauan layanan irigasi pada lahan potensi pertanian serta mempertahankan tingkat pelayanan irigasi baik bendung maupun jaringan irigasi untuk mendukung Pertanian berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan air baku dalam mendukung pengembangan potensi unggulan daerah
5. Terhindarnya kawasan permukiman dan sarana prasarana umum dari ancaman banjir dan abrasi pantai.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Konservasi DAS dan sumberdaya air lainnya.
7. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam keikutsertaan pada pemeliharaan infrastruktur ke-PU-an.

C. Bidang Sumber Penataan Ruang dan Pertanahan

1. Belum terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pemanfaatan ruang.

2. Belum terlaksananya pengendalian pengawasan dan penertiban dibidang pemanfaatan ruang dan pertanahan.
3. Belum tersedianya regulasi rencana kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi.
4. Belum terlaksananya pengendalian, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dan pertanahan di KSP dari sudut kepentingan ekonomi
5. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait penataan ruang.
6. Belum Optimalnya pengendalian pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dan pertanahan.
7. Rendahnya kualitas perencanaan tata ruang.

D. Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman

1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan strategis Provinsi.
2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan permukiman.
3. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang berwawasan lingkungan.
4. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luasan.
5. Keterbatasan masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
6. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terutama bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan tidak tetap.
7. Kerusakan lingkungan serta cuaca yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam sehingga mengakibatkan kerusakan pada hunian penduduk.

E. Bidang Jasa Konstruksi

1. Kurang optimalnya penyebaran informasi jasa konstruksi.
2. Belum optimalnya publikasi informasi public bidang ke-PU-an.
3. Rendahnya pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan jasa konstruksi.
4. Kurangnya pembinaan terhadap penyelenggara jasa konstruksi.

F. Bidang Sekretariat

1. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk pemkot/pemkab dalam mekanisme penyusunan program infrastruktur ke-PU-an.
2. Kurangnya sarana prasarana penunjang serta operasional dan pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang ke-PU-an.

4. Kurangnya data dan informasi bidang ke-PU-an dalam menunjang penyusunan infrastruktur ke-PU-an.
5. Rendahnya kompetensi dan profesionalisme SDM PUPR dalam menangani kompleksitas kegiatan

3.5.2. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas

Pembangunan perlu dilakukan atas dasar perencanaan yang matang, melibatkan peran serta masyarakat, dilakukan atas musyawarah dan argumen ilmiah tentang tingkat urgensi pembangunan tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan juga tidak terlepas dari pencapaian misi dan visi kepala daerah terpilih, supaya program-program pembangunan dapat terukur dan dapat dinilai tingkat pencapaian visi dan misi kepala daerah yang memimpin suatu wilayah pembangunan dalam kurun periode tertentu.

Komponen penting dalam dokumen rencana pembangunan adalah Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa rencana pembangunan yang bersifat sektoral dan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen rencana pembangunan yang bersifat spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menggambar koordinat spasial dimana pembangunan dilaksanakan. Hubungan implikasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan pembangunan infrastruktur serta rencana pembangunan infrastruktur adalah sangat jelas. Pembangunan infrastruktur harus mendukung visi dan misi yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat sektoral, sementara lokasi pembangunan infrastruktur dan rencana pembangunan infrastruktur dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dipetakan dengan jelas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan dokumen arahan umum, sehingga implementasi rencana pembangunan dapat dilakukan modifikasi, tanpa mengurangi hakikat dan tujuan yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RRTRKSP). Dengan demikian, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah pedoman utama pembangunan dan rencana pembangunan infrastruktur yang termuat dalam struktur ruang, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketercapaian pembangunan dalam pola ruang.

3.5.3. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis alat dasar untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan stakeholder lainnya adalah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta dikaji atas dasar daya dukung lingkungan, baik konstruksi, manfaat, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan biofisik sosial.

Turunan dari Kajian Lingkungan Hidup strategis yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kajian lingkungan rinci, seperti analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan turunan lainnya, terhadap rencana pembangunan dan pembangunan infrastruktur.

B A B I V

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan

1. Meningkatkan Ekonomi Daerah
2. Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas SDM
3. Menurunkan Disparitas Pembangunan antar Wilayah dan Masyarakat

Sasaran

1. Meningkatkan PDRB Subsektor Pertanian dan Perikanan
2. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur
3. Meningkatkan Kualitas dan Peenuhn Rencana Tata Ruang Serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2023-2026

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	75%	77%	78%	81%
2	Menurunkan Disparitas Pembangunan antar Wilayah dan Masyarakat		Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	18,93 %	32,39 %	41,80 %	54,01 %
			Meningkatkan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang Serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,65 %	0,7%	0,75 %	0,8%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu Tahun 2023-2026, disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

MISI IV : Mewujudkan Pembangunan antar Wilayah dan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunnya Disparitas Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatkan pemenuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin	Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur
	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang Serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Menyelenggarakan rekontruksi dan rehabilitasi rumah korban bencana	Peningkatan Ketaatan Tata Ruang

B A B VI

BENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005 - 2025 maka dilakukan upaya-upaya yang dijabarkan dalam bentuk daftar program dan kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum penataan ruang, urusan wajib pelayanan dasar perumahan dan permukiman, urusan pilihan pertanahan serta urusan penunjang pemerintahan daerah. Pada masing-masing urusan tersebut diuraikan kembali menjadi program, kegiatan dan subkegiatan.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman di uraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	
Strategi : Memerataan ketersediaan infrastruktur	
Arah Kebijakan : Pemerataan ketersediaan infrastruktur	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (dokumen)
Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (Dokumen)
Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan(Dokumen)
	Jumlah Dokumen Kondisi Jembatan (Dokumen)
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun (Km)
Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran menuju standar (Km)

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan (Dokumen)
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jembatan (Dokumen)
Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan (Dokumen)
	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jembatan (Dokumen)
	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeliharaan Jalan
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Km)
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)
	Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dibangun (m)
Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian (m)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (m)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (m)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
Sub Kegiatan Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli
Sub Kegiatan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan
Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi
Sub Kegiatan Penyediaan Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
Sub Kegiatan Penyusunan data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU	Jumlah dokumen hasil data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU
Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	2. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak
	3. Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1. jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (PPRG)	2. Jumlah debit pelayanan SPAM
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional
	3. Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM
Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara
Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan
	Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
	Persentase rumah tangga yg terlayani pengelolaan sampah
Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun
	Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Jumlah infrastruktur persampahan yang tersedia
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan
	Persentase rumah tangga yang besanitasi
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun
	Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk (PPRG)	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	Tingkat layanan drainase perkotaan
Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi Program provinsi
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi (Inovasi Sistem Informasi Perumahan)	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah yang dibangun atau direhab bagi korban bencana atau terkena relokasi Program provinsi
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan
	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Nilai kekumuhan
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (PPRG)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki
Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah yang ditingkatkan
Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Orang/Badan Hukum yang disertifikasi /diregistrasi yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara
	Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan
Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan
	Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	Dihitung Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Provinsi	yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan
Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	Strategis Lainnya
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Persentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun (Km)
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya Sungai
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan
	Persentase Penyediaan Air Baku
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi
Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan
Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	
Strategi : Meningkatkan ketaatan tata ruang	
Arah Kebijakan : Peningkatan ketaatan tata ruang	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan
Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PRESENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PRESENTASE Program PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi
Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Dianalisis
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan administrasi barang milik daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat												
Indikator Tujuan : Indeks Williamson			0,190	0,184		0,181		0,178		0,176		0,176
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur					Rp 273.869. 010.391		Rp 366.035. 372.923		Rp 350.276. 731.998		Rp 456.139. 807.850	
Indikator Sasaran : Persentase Ketersediaan Infrastruktur					Rp 273.869. 010.391		Rp 366.035. 372.923		Rp 350.276. 731.998		Rp 456.139. 807.850	
Strategi : Memerataan ketersediaan infrastruktur					Rp 273.869. 010.391		Rp 366.035. 372.923		Rp 350.276. 731.998		Rp 456.139. 807.850	
Arah Kebijakan : Pemerataan ketersediaan infrastruktur					Rp 273.869. 010.391		Rp 366.035. 372.923		Rp 350.276. 731.998		Rp 456.139. 807.850	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Infrast ruktur	94,64	90,13	Rp 156.176. 687.000	91,07	Rp 172.600. 142.000	91,89	Rp 163.892. 707.000	92,83	Rp 263.552. 387.000	92,83
KEGIATAN PENYELENGGARAAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari		3,69	1,76	Rp 80.300.0	1,76	Rp 81.950.0	1,76	Rp 83.650.0	1,76	Rp 85.300.0	1,76

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
JALAN PROVINSI	kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan				00.000		00.000		00.000		00.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)		3	2	Rp 1.500.000	2	Rp 1.540.000	2	Rp 1.580.000	2	Rp 1.620.000	2
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (dokumen)		1	1	Rp 900.000	1	Rp 950.000	1	Rp 1.050.000	1	Rp 1.100.000	1
Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan											
Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (Dokumen)		0,00	1	Rp 500.000	1	Rp 520.000	1	Rp 540.000	1	Rp 560.000	1
Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/		1	1	Rp 200.000	1	Rp 220.000	1	Rp 240.000	1	Rp 260.000	1

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Jembatan(Dokumen)				000		000		000		000	
	Jumlah Dokumen Kondisi Jembatan (Dokumen)		1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 220.000.000	1	Rp 240.000.000	1	Rp 260.000.000	1
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun (Km)		0,00	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00
Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran menuju standar (Km)		31,4	15	Rp 75.000.000.000	15	Rp 76.500.000.000	15	Rp 78.000.000.000	15	Rp 79.500.000.000	15
Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan (Dokumen)		0	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jembatan (Dokumen)		-	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1
Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/		0	15	Rp 1.500.000.000	15	Rp 1.500.000.000	15	Rp 1.500.000.000	15	Rp 1.500.000.000	15

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Jalan/ Jembatan	Jembatan (Dokumen)											
	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jembatan (Dokumen)		-	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2
	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeliharaan Jalan		2,559372026	0,940081552	Rp 62.229.650.000	1,057591746	Rp 66.758.630.000	0,940081552	Rp 65.821.610.000	1,057591746	Rp 69.479.600.000	1,057591746
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Km)											
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)		7,65	1	Rp 14.000.000.000	1	Rp 14.000.000.000	1	Rp 14.000.000.000	1	Rp 14.000.000.000	1
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)		14,13	7	Rp 19.250.000.000	8	Rp 22.160.000.000	7	Rp 19.530.000.000	8	Rp 22.400.000.000	8
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)		797,81	827,99	Rp 28.979.650.000	826,99	Rp 30.598.630.000	827,99	Rp 32.291.610.000	826,99	Rp 33.079.600.000	826,99
	Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan,		1,8	9,6	Rp 13.647.037.000	21	Rp 23.891.512.000	11	Rp 14.421.097.000	0,82	Rp 108.772.787.000	0,82

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	peningkatan dan pemeliharaan jembatan											
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dibangun (m)		0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 100.000.000.000	1
Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian (m)		15	15	Rp 5.250.000.000	15	Rp 5.250.000.000	15	Rp 5.250.000.000	15	Rp 5.250.000.000	15
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (m)		3508,75	3437,9	Rp 3.147.037.000	3003,4	Rp 2.951.512.000	3384,7	Rp 3.123.097.000	3772,9	Rp 3.297.787.000	3772,9
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (m)		-	350	Rp 5.250.000.000	784,5	Rp 15.690.000.000	403,2	Rp 6.048.000.000	15	Rp 225.000.000	15
PROGRAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	Infrast ruktur	50,69%	27,41%	Rp 2.792.489.000	39,15%	Rp 2.990.356.000	53,79%	Rp 3.289.149.200	70,58%	Rp 3.981.976.440	70,58%
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli			15,92%	Rp 1.799.249.000	35,03%	Rp 2.075.792.000	57,32%	Rp 2.283.128.800	82,80%	Rp 2.575.354.000	82,80%

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Ahli Konstruksi	Konstruksi											
Sub Kegiatan Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli			15 Orang	Rp 213.275.000	15 Orang	Rp 238.868.000	15 Orang	Rp 262.754.800	15 Orang	Rp 289.030.000	
Sub Kegiatan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli			2 SOP	Rp 75.000.000	0	Rp -	0	Rp -	2 SOP	Rp 82.500.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan			150 Orang	Rp 973.009.000	180 Orang	Rp 1.215.829.000	210 Orang	Rp 1.316.149.000	240 Orang	Rp 1.416.469.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi			150 Orang	Rp 537.965.000	180 Orang	Rp 621.095.000	210 Orang	Rp 704.225.000	240 Orang	Rp 787.355.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa			0,5	Rp 822.240.000	0,55	Rp 726.464.000	59.99%	Rp 799.110.400	65,00%	Rp 1.179.021.440	65,00%

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi											
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi			0	Rp -	1 Laporan	Rp 130.000.000	1 Laporan	Rp 143.000.000	1 Laporan	Rp 157.300.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			1 Laporan	Rp 280.000.000	0	Rp -	0	Rp -	1 Laporan	Rp 300.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI			30 Orang	Rp 264.330.000	30 Orang	Rp 290.763.000	30 Orang	Rp 319.839.300	30 Orang	Rp 351.823.230	
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan			1 Laporan	Rp 167.450.000	1 Laporan	Rp 184.195.000	1 Laporan	Rp 202.614.500	1 Laporan	Rp 222.875.950	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Provinsi											
Sub Kegiatan Penyusunan data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU	Jumlah dokumen hasil data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU			1 Laporan	Rp 110.460.000	1 Laporan	Rp 121.506.000	1 Laporan	Rp 133.656.600	1 Laporan	Rp 147.022.260	
Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			29%	Rp 171.000.000	57.14%	Rp 188.100.000	85.71%	Rp 206.910.000	100%	Rp 227.601.000	100%
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi			2 Laporan	Rp 171.000.000	2 Laporan	Rp 188.100.000	2 Laporan	Rp 206.910.000	2 Laporan	Rp 227.601.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Infrast ruktur	-	25%	Rp 6.150.000.000	25%	Rp 1.050.000.000	25%	Rp 24.600.000.000	25%	Rp 23.850.000.000	25%
	2. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	Infrast ruktur		0%		0%		0%		0%		0%
	3. Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Infrast ruktur		14%		29%		29%		29%		29%
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1. jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun			1 Dokumen	Rp 950.000.000	1 Dokumen	Rp 700.000.000	1 Dokumen	Rp 2.000.000.000	1 Dokumen	Rp 2.000.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM			1 Dokumen	Rp 800.000.000	1 Dokumen	Rp 700.000.000	1 Dokumen	Rp 1.400.000.000	1 Dokumen	Rp 1.400.000.000	
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional			1 Dokumen	Rp 150.000.000	0		2 Dokumen	Rp 600.000.000	2 Dokumen	Rp 600.000.000	
	2. Jumlah debit pelayanan SPAM			10 liter/detik	Rp 5.000.000.000	0	Rp -	10 liter/detik	Rp 20.000.000.000	10 liter/detik	Rp 20.000.000.000	
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (PPRG)	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional			0		0		10 liter/detik	Rp 10.000.000.000	10 liter/detik	Rp 10.000.000.000	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional			10 liter/detik	Rp 5.000.000.000	0		10 liter/detik	Rp 10.000.000.000	10 liter/detik	Rp 10.000.000.000	
	3. Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi			1 Penyelenggaraan	Rp 200.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp 350.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp 2.600.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp 1.850.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM			1 Kab/Kota	Rp 200.000. 000	2 Kab/Kota	Rp 350.000. 000	2 Kab/Kota	Rp 500.000. 000	2 Kab/Kota	Rp 350.000. 000	
Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara							1 Unit	Rp 300.000. 000	2 unit	Rp 600.000. 000	
Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota									1 Dokumen	Rp 500.000. 000	
Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota							1 Ha	Rp 1.500.00 0.000			
Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk							1 BUP	Rp 300.000. 000	1 BUP	Rp 400.000. 000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN	Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem	Infrast ruktur	-	100%	Rp 800.000. 000	0%	Rp 100.000. 000	0%	Rp -	0%	Rp 500.000. 000	0%

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan											
	Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Infrast ruktur		0%		100%		0%		0%		0%
	Persentase rumah tangga yg terlayani pengelolaan sampah	(Jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah dibagi Rumah h								10%		10%

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		tangga yang berada di wilayah lintas Kab/Kota yang ditetapkan) x 100%											
Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun			1 dok	Rp 800.000.000								
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan			1 dok	Rp 800.000.000								

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun											
	Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan					1 penyelenggaraan	Rp 100.000.000					
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					1 kelompok masyarakat	Rp 100.000.000					
	Jumlah infrastruktur persampahan yang tersedia									1 Unit	Rp 500.000.000	1 Unit
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan									1 Unit	Rp 500.000.000	1 Unit
PROGRAM	Persentase Readiness	Infrast	-	27%	Rp	18%	Rp	27%	Rp	27%	Rp	50%

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan	ruktur			2.555.000.000		2.255.000.000		2.255.000.000		2.255.000.000	
	Persentase rumah tangga yang besanitasi	Infrast ruktur		6%		6%		6%		6%		6%
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun				Rp 800.000.000		Rp 500.000.000	1 dok	Rp 500.000.000	1 dok	Rp 500.000.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun			1 Dok	Rp 800.000.000	1 Dok	Rp 500.000.000	1 Dok	Rp 500.000.000	1 Dok	Rp 500.000.000	
	Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah			140 KK	Rp 1.755.000.000	140 KK	Rp 1.755.000.000	140 KK	Rp 1.755.000.000	140 KK	Rp 1.755.000.000	
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk (PPRG)	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan			140 Unit	Rp 1.680.000.000	140 Unit	Rp 1.680.000.000	140 Unit	Rp 1.680.000.000	140 Unit	Rp 1.680.000.000	
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang			2 Kelompok	Rp 75.000.000	2 Kelompok	Rp 75.000.000	2 Kelompok	Rp 75.000.000	2 Kelompok	Rp 75.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik			Masyarakat	00	Masyarakat	00	Masyarakat	00	Masyarakat	00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan	Infrast ruktur	-	0%	Rp -	50%	Rp 28.800.000.000	50%	Rp 7.800.000.000	0%	Rp 7.000.000.000	0%
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun					1 dok	Rp 800.000.000	1 dok	Rp 800.000.000			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					1 dok	Rp 800.000.000	1 dok	Rp 800.000.000			
	Tingkat layanan drainase	Infrast			Rp		Rp		Rp		Rp	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	perkotaan	ruktur			-		28.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000	
Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan					7 unit	Rp 14.000.000.000					
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan					7 unit	Rp 14.000.000.000					
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara							7 unit	Rp 7.000.000.000	7 unit	Rp 7.000.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		-	33%	Rp 22.425.000.000	20%	Rp 29.075.000.000	27%	Rp 28.725.000.000	20%	Rp 38.725.000.000	20%
	Persentase penyelenggaraan			25%		25%		25%		25%		25%

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											
	Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi			100%		100%		100%		100%		100%
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			5 dok	Rp 1.225.000.000	3 dok	Rp 375.000.000	4 dok	Rp 525.000.000	3 dok	Rp 375.000.000	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi (Inovasi Sistem Informasi Perumahan)	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi			1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 75.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			1 Dokumen	Rp 300.000.000							
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah			1 Dokumen	Rp 350.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi			1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			1 Dokumen	Rp 350.000.000			1 Dokumen	Rp 150.000.000			
Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau			2 penyelenggaraan	Rp 200.000.000	2 penyelenggaraan	Rp 200.000.000	2 penyelenggaraan	Rp 200.000.000	2 penyelenggaraan	Rp 200.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Provinsi	Relokasi Program Provinsi											
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana			50 Orang	Rp 100.000.000	50 Orang	Rp 100.000.000	50 Orang	Rp 100.000.000	50 Orang	Rp 100.000.000	
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan			50 Orang	Rp 100.000.000	50 Orang	Rp 100.000.000	50 Orang	Rp 100.000.000	50 Orang	Rp 100.000.000	
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah yang dibangun atau direhab bagi korban bencana atau terkena relokasi program provinsi			300 unit rumah	Rp 21.000.000.000	300 unit rumah	Rp 28.500.000.000	300 unit rumah	Rp 28.000.000.000	300 unit rumah	Rp 38.150.000.000	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi			100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi					1 Dokumen	Rp 500.000.000			1 Dokumen	Rp 150.000.000	
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)			1,4 Ha		1,4 Ha		1,4 Ha		1,4 Ha	Rp 10.000.000.000	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun			100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun			100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan					100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan		-	23%	Rp 9.350.000.000	23%	Rp 9.350.000.000	23%	Rp 9.350.000.000	31%	Rp 9.850.000.000	31%
	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani			6%		6%		6%		6%		6%
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh			2 Dokumen, 1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	100 rumah	Rp 100.000.000	2 ha	Rp 600.000.000	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/									1 Dokumen	Rp 500.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Terlegalisasi											
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 100.000.000	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Nilai kekumuhan			1 Dokumen	Rp 9.250.000.000	1 Dokumen	Rp 9.250.000.000	100 rumah	Rp 9.250.000.000	2 ha	Rp 9.250.000.000	
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (PPRG)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki			100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	100 Unit Rumah	Rp 7.000.000.000	
Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15			10 Ha	Rp 2.000.000.000	10 Ha	Rp 2.000.000.000	10 Ha	Rp 2.000.000.000	10 Ha	Rp 2.000.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	(Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar											
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU		-	25%	Rp 14.925.000.000	25%	Rp 14.925.000.000	25%	Rp 14.925.000.000	25%	Rp 14.925.000.000	100%
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU			1 Dokumen, 2 Lokasi, 1 Laporan	Rp 14.925.000.000	2 Lokasi	Rp 14.925.000.000	3 Lokasi, 14 Laporan	Rp 14.925.000.000	7 Dokumen	Rp 14.925.000.000	
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			7 Dokumen	Rp 700.000.000	7 Dokumen	Rp 700.000.000	7 Dokumen	Rp 700.000.000	7 Dokumen	Rp 700.000.000	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas			7 Lokasi	Rp 14.000.000.000	7 Lokasi	Rp 14.000.000.000	7 Lokasi	Rp 14.000.000.000	7 Lokasi	Rp 14.000.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Permukiman	Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman												
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 75.000.000		
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang			7 Laporan	Rp 100.000.000	7 Laporan	Rp 100.000.000	7 Laporan	Rp 100.000.000	7 Laporan	Rp 100.000.000		
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman			1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI,	Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan		-	25%	Rp 50.000.000	25%	Rp 50.000.000	25%	Rp 50.000.000	25%	Rp 50.000.000	100%	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah yang ditingkatkan												
Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Orang/Badan Hukum yang disertifikasi /diregistrasi yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			25%	Rp 50.000.000	25%	Rp 50.000.000	25%	Rp 50.000.000	25%	Rp 50.000.000	100%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah				Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara		-	24%	Rp 2.490.000.000	65%	Rp 19.090.000.000	100%	Rp 5.090.000.000	100%	Rp 1.390.000.000	100%	100%
	Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan			0%		100%		100%		100%			100%
Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan			4 unit	Rp 1.890.000.000	7 unit	Rp 19.090.000.000	6 unit	Rp 5.090.000.000	Rp -	Rp 1.390.000.000		
	Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan			1 dok	Rp 600.000.000								
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan					3 unit	Rp 12.500.000.000						

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Daerah Provinsi	Strategis Daerah Provinsi											
	Dihitung Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			2 dok	Rp 600.000.000							
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai			0%	Rp -	1 unit	Rp 6.000.000.000	1 unit	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp -	
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan			1 unit	Rp 1.000.000.000	1 unit	Rp 100.000.000	4 unit	Rp 600.000.000	6 unit	Rp 900.000.000	
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan			3 unit	Rp 100.000.000	3 unit	Rp 100.000.000	3 unit	Rp 100.000.000	3 unit	Rp 100.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi												
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan			1 unit	Rp 400.000.000	Rp -	Rp -	1 unit	Rp 3.000.000.000	Rp -	Rp -		
Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi			1 Laporan	Rp 60.000.000	1 Laporan	Rp 60.000.000	1 Laporan	Rp 60.000.000	1 Laporan	Rp 60.000.000		
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat			40 peserta	Rp 250.000.000	40 peserta	Rp 250.000.000	40 peserta	Rp 250.000.000	40 peserta	Rp 250.000.000		

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)			2 Laporan	Rp 30.000.000	2 Laporan	Rp 30.000.000	2 Laporan	Rp 30.000.000	2 Laporan	Rp 30.000.000	
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara			1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas kawasan yang tertata			7%	Rp 6.210.000.000	44%	Rp 6.660.000.000	100%	Rp 8.510.000.000	100%	Rp 610.000.000	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya			2 Ha	Rp 6.210.000.000	10 Ha	Rp 6.660.000.000	15 Ha	Rp 8.510.000.000	15 Ha	Rp 610.000.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan			2 dokumen	Rp 800.000.000	-	Rp -	1 dokumen	Rp 400.000.000	-	Rp -	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun											
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 250.000.000	1 dokumen	Rp 400.000.000	-	Rp -	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis			2 Hektar	Rp 4.800.000.000	10 Hektar	Rp 6.000.000.000	15 hektar	Rp 7.200.000.000	-	Rp -	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Lainnya											
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			1.15 Hektar	Rp 150.000.000	2 Hektar	Rp 100.000.000	10 Hektar	Rp 200.000.000	15 Hektar	Rp 300.000.000	
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota			40 peserta	Rp 250.000.000	40 peserta	Rp 250.000.000	40 peserta	Rp 250.000.000	40 peserta	Rp 250.000.000	
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			1 Dokumen	Rp 60.000.000	1 Dokumen	Rp 60.000.000	1 Dokumen	Rp 60.000.000	1 Dokumen	Rp 60.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air		0,00%	26,07%	Rp 49.944.834.391	64,74%	Rp 79.089.874.923	80,52%	Rp 81.789.875.798	100,00%	Rp 89.450.444.410	100,00%
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Prosentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi		1,67%	1,49%	Rp 25.356.895.641	1,49%	Rp 31.703.142.298	1,49%	Rp 19.956.061.855	1,49%	Rp 52.050.949.073	1,49%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai		0	4 Dokumen	Rp 2.300.000.000	3 Dokumen	Rp 600.000.000	1 Dokumen	Rp 300.000.000	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0,03000	0,74	Rp 3.978.866.616	2,21	Rp 13.043.465.346	1,35	Rp 7.971.672.900	2,09	Rp 16.793.222.100	2,09
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun (Km)		0,071	1,25	Rp 5.872.289.500	3,13	Rp 7.940.451.460	1,60	Rp 4.536.448.950	1,34	Rp 2.263.124.568	1,34
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		0	1,20	Rp -	2,60	Rp 1.530.72	4,10	Rp 3.177.67	0,0	Rp 1.670.52	0,00

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							4.967		8.480		6.000	
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi		0,5	1,00	Rp 9.240.478.000	1,00	Rp 4.620.239.000	0,00	Rp -	1,00	Rp 27.351.814.880	1,00
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya Sungai		7,7	21,00	Rp 3.840.261.525	21,00	Rp 3.840.261.525	21,00	Rp 3.840.261.525	21,00	Rp 3.840.261.525	21,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		0	1 Lembaga	Rp 125.000.000	1 Lembaga	Rp 128.000.000	1 Lembaga	Rp 130.000.000	1 Lembaga	Rp 132.000.000	1 Lembaga
	Persentase Penyediaan Air Baku			0,00060	Rp 1.550.000.000	0,00060	Rp 3.300.000.000	0,00060	Rp 3.200.000.000	0,00060	Rp 150.000.000	0,00060
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			2 Dokumen	Rp 800.000.000	1 Dokumen	Rp 500.000.000	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen
Pembangunan Embung	Jumlah Embung dan			1 Unit	Rp	1 Unit	Rp	0 Unit	Rp	0 Unit	Rp	0 Unit

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
dan Penampung Air Lainnya	Penampung Air Lainnya yang Dibangun				750.000.000		1.500.000.000		-		-	
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi			0 Unit	Rp -	1 Unit	Rp 1.200.000.000	1 Unit	Rp 3.000.000.000	0 Unit	Rp -	0 Unit
Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara			0 Unit	Rp -	1 Unit	Rp 100.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 150.000.000	1 Unit
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola		3,86	2302,00	Rp 23.037.938.750	3002,00	Rp 44.086.732.625	3876,00	Rp 58.633.813.943	4326,00	Rp 37.249.495.337	4326,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		4 Dokumen	2 Dokumen	Rp 2.000.000.000	2 Dokumen	Rp 700.000.000	1 Dokumen	Rp 1.000.000.000	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		1 .Rehabilitasi	0,00	Rp -	0,00	Rp -	2.3 Km	Rp 1.875.000.000	0,00	Rp -	0,00

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Jaringan Irigasi (DAK) 60 Ha 2.Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air 4 Laporan 3.Pemberdayaan Petani Pemakai Air 3 P3A									
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi			0,00	Rp -	0,00	Rp -	10 Km	Rp 3.750.000.000	10 Km	Rp 3.750.000.000	10 Km
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang		1200,00	4 Km	Rp 10.750.0	4 Km	Rp 10.750.0	6.5 Km	Rp 18.232.0	4 Km	Rp 10.750.0	4 Km

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Ditingkatkan				00.000		00.000		00.000		00.000	
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Serdang Pergam 150 Ha	10 Km	Rp 9.000.000.000	15 Km	Rp 11.250.000.000	15 Km	Rp 11.250.000.000	0 Km	Rp -	0 Km
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			0 Km	Rp -	3000,00	Rp 10.000.000.000	3000,00	Rp 10.000.000.000	3000,00	Rp 10.000.000.000	3000,00
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun			0,00	Rp -	3 Km	Rp 10.000.000.000	3 Km	Rp 10.000.000.000	3 Km	Rp 10.000.000.000	3 Km
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara		2,00	10 Km	Rp 395.175.500	10 Km	Rp 434.693.050	11 Km	Rp 956.324.710	14 Km	Rp 1.051.957.181	14 Km
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			5.5 Km	Rp 592.763.250	5.5 Km	Rp 652.039.575	8.5 Km	Rp 1.270.489.233	8.5 Km	Rp 1.397.538.156	8.5 Km
Operasional Unit Pengelola	Jumlah Unit Pengelola			1	Rp	1	Rp	1	Rp	1	Rp	1

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Irigasi	Irigasi yang Difungsikan			Dokumen	300.000.000	Dokumen	300.000.000	Dokumen	300.000.000	Dokumen	300.000.000	Dokumen
Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang				0,6	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Indikator Sasaran : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang				0,6	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Strategi : Meningkatkan ketaatan tata ruang				0,6	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Arah Kebijakan : Peningkatan ketaatan tata ruang				0,6	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang	Tata Ruang	69,63%	85%	Rp 6.450.000.000	86%	Rp 3.350.000.000	87%	Rp 2.900.000.000	88%	Rp 2.950.000.000	88%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang	Dihitung Jumlah		3 Dokumen	Rp 2.000.000.000	1 Laporan	Rp 500.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Provinsi yang ditetapkan	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan										
Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi			1	Rp 1.500.000.000		Rp -		Rp -		Rp -	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub			1	Rp 500.000.		Rp -		Rp -		Rp -	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Penataan Ruang	selain RTRW Provinsi				000								
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					1	Rp 500.000.000						
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			1 Dokumen	Rp 900.000.000	1 Dokumen	Rp 400.000.000	1 Dokumen	Rp 400.000.000	1 Dokumen	Rp 400.000.000		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang												
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota			1	Rp 500.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota			1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat			1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang				Rp 1.300.000.000		Rp 350.000.000		Rp 350.000.000		Rp 350.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			4	Rp 1.000.000.000	4	Rp 50.000.000	4	Rp 50.000.000	4	Rp 50.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				Rp 2.250.000.000		Rp 2.100.000.000		Rp 2.150.000.000		Rp 2.200.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			1	Rp 500.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			1	Rp 750.000.000	1	Rp 750.000.000	1	Rp 750.000.000	1	Rp 750.000.000	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			5	Rp 250.000.000	5	Rp 300.000.000	5	Rp 350.000.000	5	Rp 400.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1	Rp 750.000.000	1	Rp 750.000.000	1	Rp 750.000.000	1	Rp 750.000.000	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PRESENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tata Ruang	N/A	80%	Rp 3.150.000.000	85%	Rp 700.000.000	90%	Rp 800.000.000	100%	Rp 900.000.000	100%
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			1	Rp 3.150.000.000	1	Rp 700.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 900.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah			1	Rp 350.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 450.000.000	1	Rp 500.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Provinsi											
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			1	Rp 2.800.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 350.000.000	1	Rp 400.000.000	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PRESENTASE PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Tata Ruang	N/A	20%	Rp 500.000.000	30%	Rp 550.000.000	40%	Rp 650.000.000	50%	Rp 700.000.000	50%
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			1	Rp 250.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 350.000.000	1	Rp 400.000.000	
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan	Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana			1	Rp 250.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 350.000.000	1	Rp 400.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum											
Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi			1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	
Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah			1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tata Ruang	N/A	15%	Rp 400.000.000	20%	Rp 400.000.000	25%	Rp 400.000.000	30%	Rp 400.000.000	30%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	
Inventarisasi Sengketa,	Jumlah Data Sengketa,			1	Rp	1	Rp	1	Rp	1	Rp	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah					Rp 32.000.000.000		Rp 33.100.000.000		Rp 34.300.000.000		Rp 35.400.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD	Infrastuktur dan tata Ruang	77	78	Rp 1.000.000.000	79	Rp 1.100.000.000	80	Rp 1.300.000.000	81	Rp 1.400.000.000	81
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	Infrastuktur dan tata Ruang	55	80	Rp 31.000.000.000	80	Rp 32.000.000.000	80	Rp 33.000.000.000	82	Rp 34.000.000.000	82
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 1.000.000.000		Rp 1.100.000.000		Rp 1.300.000.000		Rp 1.400.000.000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan											

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp 500.000.000		Rp 550.000.000		Rp 650.000.000		Rp 700.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 500.000.000		Rp 550.000.000		Rp 650.000.000		Rp 700.000.000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Dianalisis				Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis				Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan				Rp 24.000.000.000		Rp 25.000.000.000		Rp 26.000.000.000		Rp 27.000.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			200	Rp 23.900.000.000	200	Rp 24.900.000.000	200	Rp 25.900.000.000	200	Rp 26.900.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				Rp 40.000.000		Rp 40.000.000		Rp 40.000.000		Rp 40.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	steran SKPD											
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan adminitrasi barang milik daerah				Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang				Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000		Rp 25.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Milik Daerah pada SKPD				00		00		00		00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian				Rp 500.000.000		Rp 500.000.000		Rp 500.000.000		Rp 500.000.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				Rp 210.000.000		Rp 210.000.000		Rp 210.000.000		Rp 210.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan				Rp 100.000.		Rp 100.000.		Rp 100.000.		Rp 100.000.	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				000		000		000		000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan				Rp 1.000.000.000		Rp 1.000.000.000		Rp 1.000.000.000		Rp 1.000.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Rp 150.000.000		Rp 150.000.000		Rp 150.000.000		Rp 150.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Rp 350.000.000		Rp 350.000.000		Rp 350.000.000		Rp 350.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										Rp -	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 1.500.000.000		Rp 1.500.000.000		Rp 1.500.000.000		Rp 1.500.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang				Rp 100.000.		Rp 100.000.		Rp 100.000.		Rp 100.000.	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Disediakan				000		000		000		000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				Rp 100.000. 000		Rp 100.000. 000		Rp 100.000. 000		Rp 100.000. 000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Rp 100.000. 000		Rp 100.000. 000		Rp 1.100.00 0.000		Rp 1.100.00 0.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Rp 100.000. 000		Rp 100.000. 000		Rp 100.000. 000		Rp 100.000. 000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan				Rp 1.100.00 0.000		Rp 1.100.00 0.000		Rp 100.000. 000		Rp 100.000. 000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 3.000.00 0.000		Rp 3.000.00 0.000		Rp 3.000.00 0.000		Rp 3.000.00 0.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Rp 50.000.0 00		Rp 50.000.0 00		Rp 50.000.0 00		Rp 50.000.0 00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				Rp 400.000.		Rp 400.000.		Rp 400.000.		Rp 400.000.	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				000		000		000		000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Rp 2.500.000.000		Rp 2.500.000.000		Rp 2.500.000.000		Rp 2.500.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 900.000.000		Rp 900.000.000		Rp 900.000.000		Rp 900.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Rp 200.000.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000	

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Rp 200.000.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				Rp 150.000.000		Rp 150.000.000		Rp 150.000.000		Rp 150.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Rp 300.000.000		Rp 300.000.000		Rp 300.000.000		Rp 300.000.000	
TOTAL PAGU RENSTRA DINAS					Rp 316.369.010.391		Rp 404.135.372.923		Rp 389.326.731.998		Rp 496.489.807.850	

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan yang dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	N/A	18,93%	32,39%	41,80%	54,01%	100,00%
	Sasaran: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	N/A	18,93%	32,39%	41,80%	54,01%	100,00%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
		Nilai SAKIP PD		78	79	80	81	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	2	2	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9	9	9	9	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Dianalisis		2	2	2	2	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis		9	9	9	9	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan		-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan						

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara						
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
2.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air		26,07%	64,74%	80,52%	100,00%	
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi		1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan		4	3	1	0	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai (Dokumen)						
	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (Km)	-	0,744	2,214	1,35	2,09	
	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun (Km)		1,25	3,13	1,6	1,344	
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (Km)		1,2	2,6	4,2	0	
	Sub Kegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi (Unit)		1	1	0	1	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya Sungai (Km)		21	21	21	21	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)		2	1	0	0	
	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)		1	1	0	0	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		0	1	1	0	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara		0	1	1	1	
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola	-	2302	3002	3876	4326	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)		2	2	1	0	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)		-	-	2,3	-	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (Km)		-	-	10	10	
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (Km)		4	4	0,5	4	
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (Km)		10	15	15	0	
	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang		0	3,000	3,000	3,000	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Permukaan	Dibangun (Km)						
	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (Km)		-	3	3	3	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)		10	10	11	14	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)		5,5	5,5	8,5	8,5	
	Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (Unit)		1	1	1	1	
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang		85%	86%	87%	88%	
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan		3 Dokumen	1 Laporan	-	-	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi		1 Dokumen	-	-	-	
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi		1 Dokumen	-	-	-	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		-	1 Dokumen	-	-	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (Dokumen)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		1	-	-	-	
	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat		1	1	1	1	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang		-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		4	4	4	4	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi		-	-	-	-	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		5	5	5	5	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1	1	1	1	
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1	1	1	1	
5	Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	%	27,41%	39,15%	53,79%	70,58%	100,00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		15,92%	35,03%	57,32%	82,80%	
	Sub Kegiatan Penyiapan	Jumlah		15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Instruktur/Asesor/Penyelenggaraan Pelatihan	Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli						
	Sub Kegiatan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	-	2 SOP	-	-	2 SOP	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	-	150 Orang	180 Orang	210 Orang	240 Orang	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	-	150 Orang	180 Orang	210 Orang	240 Orang	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		1 Laporan	-	-	1 Laporan	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI		30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi						
	Sub Kegiatan Penyusunan data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU	Jumlah dokumen hasil data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
6	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik		100%	100%	100%	100%	
	Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang		30 Orang
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket
	Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Peralatan workshop	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	90,01%	91,1%	91,9%	92,8%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan		1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)		2	2	2	2	
	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (Dokumen)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan(Dokumen)		1	1	1	1	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun (Km)		0	0	0	0	
	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran menuju standar (Km)		15	15	15	15	
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan (Dokumen)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan (Dokumen)		15	15	15	15	
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Km)		-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)		7	8	7	8	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)		827,99	826,99	827,99	826,99	
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dibangun (m)		0	0	0	1	
	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian (m)		15	15	15	15	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (m)		3437,86	3003,36	3384,66	3772,86	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (m)		350	784,5	403,2	15	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (dokumen)		1	1	1	1	
		Jumlah Dokumen Kondisi Jembatan (Dokumen)		1	1	1	1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jembatan (Dokumen)		1	1	1	1	
		Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jembatan (Dokumen)		2	2	2	2	
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		25%	25%	25%	25%	
		persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak		0%	0%	0%	0%	
		Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis		14%	29%	29%	29%	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi						
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)		1	1	1	1	
		Jumlah debit pelayanan SPAM (liter/detik)		10	-	10	10	
		Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi (Penyelenggaraan)		1	2	2	2	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional (Dokumen)		1	-	2	2	
	Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (PPRG)	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (liter/dtk)		-	-	10	10	
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional (liter/dtk)		10	-	10	10	
	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)		1	2	2	2	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara (Unit)		-	-	1	2	
	Sub Kegiatan Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	-	-	1	
	Sub Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Ha)		-	-	1	-	
	Sub Kegiatan Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang Dibentuk (BUP)		-	-	1	1	
9.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan		100%	0%	0%	0%	
		Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan		0%	100%	0%	0%	
		Persentase rumah tangga yg terlayani pengelolaan sampah		-	-	-	10%	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun (Dokumen)		1	-	-	-	
		Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (Penyelenggaraan)		-	1	-	-	
		Jumlah infrastruktur persampahan yang tersedia (Unit)		-	-	-	1	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)		1	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Unit)		-	1	-	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan (unit)		-	-	-	1	
10.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan		27%	18%	27%	27%	
		Persentase rumah tangga yang besanitasi		6%	6%	6%	6%	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun (Dokumen)		3	2	3	3	
		Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah (KK)		140	140	140	140	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk (PPRG)	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (Unit)		140	140	140	140	
	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat)		2	2	2	2	
11.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan		0%	50%	50%	0%	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun		-	1	1	-	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	(Dokumen)						
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)		-	1	1	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)		-	7	-	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	7	-	-	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)		-	-	7	7	
12.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		33%	20%	27%	20%	
		Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		25%	25%	25%	25%	
		Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Dokumen)		5	3	4	3	
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi (Inovasi Sistem Informasi Perumahan)	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)		1	-	1	-	
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau						

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Relokasi Program Provinsi						
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat /Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	
	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	
3.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah yang dibangun atau direhab bagi korban bencana atau terkena relokasi program provinsi (Unit Rumah)		300	300	300	300	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi		100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	
	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi		-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	
	Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)		1,4 Ha	1,4 Ha	1,4 Ha	1,4 Ha	
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun		100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun		100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	
	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		-	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	
13.	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan		23%	23%	23%	31%	
		Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani		6%	6%	6%	6%	
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh						
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)		-	-	-	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan		1	1	1	1	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Permukiman	dan Kawasan Permukiman (Laporan)						
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Nilai kekumuhan		1 Dokumen	1 Dokumen	100 Rumah	2 Ha	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (PPRG)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki		100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	
	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar		10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	
14.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU		25%	25%	25%	24%	
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU						
	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)		7	7	7	7	
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (lokasi)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang		7	7	7	7	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(laporan)						
	Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman (Dokumen)		1	1	1	1	
15.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah yang ditingkatkan		25%	25%	25%	25%	
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Orang/Badan Hukum yang disertifikasi /diregistrasi yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah (Laporan)		1	1	1	1	
16.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselesaikan		24%	65%	100%	100%	
		Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan		0%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan						
		Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan						
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Unit)		0	3	0	0	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui (unit)		0	1	1	0	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)		1	1	4	6	
	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk		3	3	3	3	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Strategis Provinsi	Kepentingan Strategis Provinsi (Unit)						
	Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)		1	0	1	0	
	Sub Kegiatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi (Laporan)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat (Peserta)		40	40	40	40	
	Sub Kegiatan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Laporan)		2	2	2	2	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara (Dokumen)		1	1	1	1	
17.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Luas kawasan yang tertata		7%	44%	100%	100%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya (Ha)		2	10	15	15	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)		2	-	1	-	
	Sub Kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Dokumen)		1	1	1	1	
	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Ha)		2	10	15	-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional		1,15	21	10	15	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Ha)						
	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota (Peserta)		40	40	40	40	
	Sub Kegiatan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)		1	1	1	1	

B A B VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2023 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman telah dikorelasikan dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2023-2026, dengan visi “**Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi**” yang juga selaras dengan produk perencanaan pembangunan lainnya, baik dalam perencanaan maupun implementasinya. Selain itu, isu permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat kawasan permukiman juga telah diselaraskan dengan target-target kinerja dari Kementerian dan Lembaga serta perencanaan pembangunan Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari seluruh pihak terkait terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat kawasan permukiman. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat kawasan permukiman serta program kegiatan pendukungnya untuk periode satu tahun.

PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN